

**PREFERENSI PETANI KOPI ROBUSTA TERHADAP KEBIJAKAN
PERTANIAN DI DESA SRIMULYO KECAMATAN DAMPIT
KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR**

Oleh
RUTH HASIANI



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
MALANG**

2018

**PREFERENSI PETANI KOPI ROBUSTA TERHADAP KEBIJAKAN
PERTANIAN DI DESA SRIMULYO KECAMATAN DAMPIT
KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR**

Oleh

RUTH HASIANI

145040107111004

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Pertanian Strata Satu (S-1)**

**JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2018

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa segala pernyataan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian saya sendiri, dengan bimbingan dosen pembimbing. Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, Juni 2018

Ruth Hasiani



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Preferensi Petani Kopi Robusta Terhadap Kebijakan
Pertanian di Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten
Malang Jawa Timur

Nama : Ruth Hasiani

NIM : 145040107111004

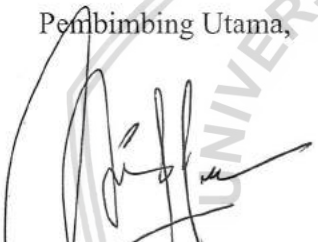
Jurusan : Sosial Ekonomi Pertanian

Program Studi : Agribisnis


Disetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping II,



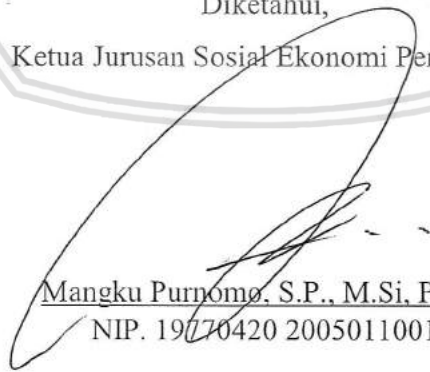
Dr. Sujarwo, SP., MP., M.Sc.
NIP. 197806032005011019



Putri Budi Setyowati, SP., M.Sc.
NIK. 2016079003312001

Diketahui,

Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian,



Mangku Purnomo, S.P., M.Si, Ph.D.
NIP. 19770420 2005011001

Tanggal Persetujuan:

LEMBAR PENGESAHAN

Mengesahkan
MAJELIS PENGUJI

Penguji I



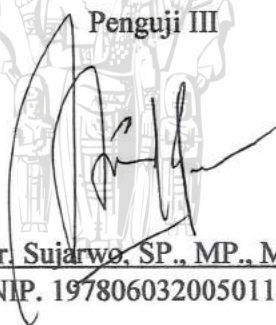
Novil Dedy Andriatmoko, SP., MP., MBA
NIP. 2016078811301001

Penguji II



Putri Budi Setyowati, SP., M.Sc.
NIK. 2016079003312001

Penguji III



Dr. Sujarwo, SP., MP., M.Sc.
NIP. 197806032005011019

Tanggal Lulus:

RINGKASAN

RUTH HASIANI. 145040107111004. Preferensi Petani Kopi Robusta Terhadap Kebijakan Pertanian di Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Jawa Timur. Di bawah bimbingan Dr. Sujarwo, SP., MP., M.Sc. dan Putri Budi Setyowati, SP., M.Sc.

Kopi merupakan salah satu hasil komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya. Di Kecamatan Dampit, kopi robusta merupakan komoditas unggulan yang berkualitas dan telah dikembangkan secara turun-temurun oleh petani kopi sejak tahun 1930. Komoditas tersebut telah memiliki label dan cukup terkenal di pasaran baik di tingkat nasional maupun internasional dengan nama Kopi Dampit atau *Dampit Coffee*. Dibalik potensi yang dimiliki, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi para petani kopi robusta di salah satu desa Kecamatan Dampit. Salah satunya yaitu daya tawar petani kopi robusta tergolong masih rendah akibat adanya kebijakan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% bagi para eksportir kopi. Rendahnya harga kopi robusta di tingkat petani inilah yang menjadi kendala bagi para petani dalam memperoleh keuntungan sehingga hal tersebut dapat berdampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan petani. Selain itu, kendala lain yang dihadapi saat ini dalam pengembangan mutu dan standardisasi hasil produksi adalah tidak berkembangnya sarana alat dan mesin pengolahan akibat masih tingginya harga alat dan mesin tersebut.

Kompleksnya permasalahan yang dihadapi petani kopi robusta di salah satu desa Kecamatan Dampit tersebut menuntut suatu pemecahan, salah satunya yaitu melalui kebijakan pertanian yang lebih memihak petani. Oleh karena itu, analisis preferensi petani terhadap kebijakan pertanian penting untuk dilakukan agar pemerintah dapat menentukan kebijakan pertanian yang sesuai dengan preferensi petani. Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) menganalisis preferensi petani kopi robusta terhadap kebijakan pertanian dan untuk (2) menganalisis tingkat kepentingan relatif petani kopi robusta terhadap aspek kebijakan pertanian. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan dilaksanakan pada bulan September 2017 hingga Januari tahun 2018 di Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Metode penentuan sampel menggunakan *simple random sampling* dengan menggunakan rumus Parel *et al.* (1973). Melalui metode tersebut diperoleh jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu berjumlah 47 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah Konjoin.

Hasil dari penelitian menunjukkan berdasarkan aspek teknis produksi, secara umum responden suka dengan kebijakan bantuan alsintan karena *utility* untuk bantuan alsintan mempunyai nilai lebih besar, yaitu sebesar 29,454. Berdasarkan aspek ekonomi produksi, secara umum responden suka dengan

kebijakan harga pupuk karena *utility* untuk harga pupuk adalah positif, yaitu sebesar 28,499. Berdasarkan aspek kelembagaan pertanian, secara umum responden suka dengan kebijakan penguatan kelembagaan karena *utility* untuk penguatan kelembagaan adalah positif, yaitu sebesar 13,570. Sedangkan berdasarkan aspek kelestarian lingkungan, secara umum responden suka dengan kebijakan biodiversitas atau penyelamatan keanekaragaman karena *utility* untuk biodiversitas adalah positif, yaitu sebesar 9,257. Secara umum, responden menganggap aspek teknis produksi adalah faktor terpenting dalam menilai sebuah kebijakan pertanian (38,949%). Di sisi lain, aspek kelembagaan pertanian paling dianggap tidak penting (11,374%). Pengukuran korelasi baik secara Pearson ataupun Kendall menghasilkan angka korelasi yang relatif kuat, yakni di atas 0,5. Pengukuran kedua korelasi tersebut signifikan karena angka *Significance* keduanya di bawah 0,05.

Saran yang dapat diberikan ialah pemerintah harus dapat menyesuaikan antara kebijakan yang dirumuskan dengan keinginan para petani dengan cara menambah bantuan berupa mesin *pulper* dan *huller*, pemerataan subsidi pupuk, mengadakan program pendampingan manajemen keuangan, dan membantu petani dalam mengembangkan usahanya melalui diversifikasi pertanian. Pemerintah juga harus memberikan perhatian yang lebih kepada aspek teknis produksi agar tujuan terbentuknya kebijakan pertanian dapat tercapai secara optimal.

SUMMARY

RUTH HASIANI. 145040107111004. The Preferences of Robusta Coffee Farmers on Agricultural Policy in Srimulyo Village, Dampit District, Malang Regency, East Java. Under the guidance of Dr. Sujarwo, SP., MP., M.Sc. and Putri Budi Setyowati, SP., M.Sc.

Coffee is one of the plantation commodities that have high economic value among other plantation crops. In Dampit District, robusta coffee is a prime commodity of quality and has been developed for generations by coffee farmers since 1930. The commodity has been labeled and quite famous in the market both nationally and internationally under the name of *Dampit Coffee*. Behind its potential, there are several problems faced by the farmers of robusta coffee in one of the villages in Dampit District. One of them is the low bargaining power of farmers due to the policy of applying Value Added Tax (VAT) of 10% for coffee exporters. The low selling price of robusta coffee at farm level becomes the obstacle for the farmers in gaining profits so that it decreases the welfare level of the farmers. In addition, other obstacles encountered in the development of quality and standardization of production results is the lack of tools and processing machines because of its high price.

The complex problem faced by the farmers of robusta coffee in one village in Dampit District demands a solution, one of them is through farm policies that favor the farmers. Therefore, the analysis of farmers' preferences on agricultural policy is important to be done so that the government can create agricultural policies in accordance to the preferences of farmers. This study aims to (1) analyze the preferences of robusta coffee farmers on agricultural policy and to (2) analyze the importance values of robusta coffee farmers on the aspects of agricultural policy. The study used a quantitative approach and was implemented in September 2017 to January 2018 in Srimulyo Village, Dampit District, Malang Regency. The method used in determining the sample is simple random sampling using the formula of Parel et al. (1973). Through this method, a total of 47 people is obtained as the samples of this study. The data analysis technique used is Konjoin.

The results of the research show that based on the aspect of technical production, respondents generally favor the policy of agricultural tools and machinery aid because the utility value for agricultural tools and machinery aid is positive, which is 29,454. Based on the aspect of economic production, respondents generally favor the fertilizer price policy because the utility value for the fertilizer price is positive, which is 28,499. Based on the aspect of institutional agriculture, respondents generally favor the institutional strengthening policy because the utility value for the institutional strengthening is positive, which is 13,570. Moreover, based on the aspect of environmental sustainability, respondents generally favor biodiversity policy because the utility value for biodiversity is positive, which is 9,257. In general, respondents consider the aspect of technical production as the

most important factor in assessing an agricultural policy (38.949%), while the aspect of institutional agriculture is considered the least important (11.374%). The correlation measurements of either Pearson or Kendall shows relatively strong correlation, which is above 0.5. The measurement of both correlations are significant because the significance number of both are below 0.05.

The suggestion from this research is that the government should be able to adjust the formulated policies and take the farmers' preferences as consideration by increase the aid of pulper and huller machines, improve the distribution of fertilizer subsidies, conduct financial management assistance programs, and assist farmers in developing their businesses through agricultural diversification. The government also should pay more attention to the aspect of technical production so that the goal of agricultural policy can be achieved optimally.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Ruth Hasiani. Penulis dilahirkan di Bandung pada tanggal 20 Januari 1996. Penulis merupakan puteri kedua dari tiga bersaudara dari keluarga Bapak Ir. Sontang Hutapea dan Ibu Sarmauli Panjaitan.

Penulis menempuh pendidikan formal pada tahun 2000 hingga tahun 2002 di TK Santa Ursula Bandung, kemudian pada tahun 2002 hingga tahun 2008 di SD Santa Ursula Bandung. Pada tahun 2008 hingga tahun 2011, penulis menempuh pendidikan formal di SMP Santa Ursula Bandung. Lalu, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 7 Bandung pada tahun 2011 hingga tahun 2014. Setelah itu, penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang melalui jalur mandiri SPMK (Seleksi Program Minat dan Kemampuan).

Selama menempuh pendidikan di S1, penulis pernah menjadi asisten praktikum Pengantar Ekonomi Pertanian pada tahun 2015 dan asisten praktikum Ekonomi Makro pada tahun 2018. Penulis pernah aktif dalam kegiatan organisasi sebagai koordinator bidang Humas dan Buletin di UKMK (Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen) Christian Community, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Selain itu, penulis juga aktif dalam kepanitiaan sebagai anggota dari sie publikasi, dekorasi dan dokumentasi, sie doa, dan sie musik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kasih dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Preferensi Petani Kopi Robusta Terhadap Kebijakan Pertanian di Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Jawa Timur”. Di dalam skripsi ini memuat teori pendukung, kerangka, dan teknik analisis konjoin yang digunakan agar tujuan yang diharapkan penulis dapat tercapai.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sujarwo, SP., MP., M.Sc. sebagai pembimbing utama dan Ibu Putri Budi Setyowati, SP., M.Sc. sebagai pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta saran selama penyusunan skripsi;
2. Orangtua tercinta dan kakak-adikku yang selalu mendukung selama penyelesaian skripsi ini;
3. Seluruh sahabat penulis yang telah membantu, mendorong, dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Dan bagi seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu untuk semua dukungan dan bantuannya.

Penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Malang, Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
SUMMARY	iii
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Batasan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
2.2. Konsep Pembangunan Pertanian	8
2.3. Kebijakan Pembangunan Pertanian	10
2.3.1. Bidang Cakupan	10
2.3.2. Aspek Teknis Produksi	13
2.3.3. Aspek Ekonomi Produksi.....	13
2.3.4. Aspek Kelembagaan Pertanian	14
2.3.5. Aspek Kelestarian Lingkungan	15
2.3.6. Proses Pembuatan	15
2.4. Preferensi Petani Terhadap Kebijakan Pertanian	16
III. KERANGKA KONSEP PENELITIAN	18
3.1. Kerangka Pemikiran	18
3.2. Hipotesis	20
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	21
IV. METODE PENELITIAN.....	26
4.1. Pendekatan Penelitian.....	26
4.2. Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian	26
4.3. Teknik Penentuan Sampel	27
4.4. Teknik Pengumpulan Data	28
4.5. Teknik Analisis Data	29
4.5.1. Analisis Konjoin	29

V. HASIL DAN PEMBAHASAN	35
5.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	35
5.1.1. Wilayah Administratif	35
5.1.2. Keadaan Geografis	35
5.1.3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur	36
5.1.4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	37
5.1.5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	38
5.2. Karakteristik Petani Responden	39
5.2.1. Umur Petani Responden	39
5.2.2. Pengalaman Berusahatani Petani Responden	39
5.3. Analisis Preferensi Petani Kopi Terhadap Kebijakan Pertanian	40
5.4. Analisis Tingkat Kepentingan Relatif Petani Kopi Terhadap Aspek Kebijakan Pertanian	46
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	48
6.1. Kesimpulan	48
6.2. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	53



DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Bidang, Generik dan Instansi Pembuat Kebijakan Pertanian.....	11
2.	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	14
3.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Aspek Teknis Produksi..	21
4.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Aspek Ekonomi Produksi	23
5.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Aspek Kelembagaan Pertanian.....	24
6.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Aspek Kelestarian Lingkungan	25
7.	Atribut dan Level	30
8.	Penggunaan Lahan di Desa Srimulyo	35
9.	Jumlah Penduduk Desa Srimulyo Berdasarkan Umur	36
10.	Jumlah Penduduk Desa Srimulyo Berdasarkan Tingkat Pendidikan	37
11.	Prasarana Pendidikan Formal di Desa Srimulyo.....	37
12.	Mata Pencaharian Penduduk Desa Srimulyo	38
13.	Distribusi Responden Berdasarkan Umur.....	39
14.	Distribusi Responden Berdasarkan Pengalaman Berusahatani.....	40
15.	Hasil Utilities untuk Overall Statistics.....	40
16.	Hasil Importance Values untuk Overall Statistics	46
17.	Hasil Correlations untuk Overall Statistics	47

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran Penelitian.....	20



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	Data Pendukung	53
2.	Prosedur Perhitungan Sampel	55
3.	Kuesioner Penelitian	56
4.	Peta Desa Srimulyo	61
5.	Rancangan Taraf Atribut (Stimuli)	62
6.	Diagram Utilities dan Importance Values untuk Overall Statistics	63
7.	Karakteristik Petani Responden	64
8.	Dokumentasi	66



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kopi merupakan salah satu hasil komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya. Kopi berperan penting sebagai sumber devisa negara dikarenakan potensinya yang tinggi terhadap kegiatan ekspor. Kopi menjadi salah satu komoditas unggulan dalam subsektor perkebunan di Indonesia karena memiliki peluang pasar yang besar, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Sebagian besar produksi kopi di Indonesia merupakan komoditas perkebunan yang dijual ke pasar dunia (ekspor). Menurut *International Coffee Organization* (2015), konsumsi kopi meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut menjadi alasan Indonesia untuk meningkatkan produksi kopi yang memiliki peluang besar untuk diekspor.

Di Indonesia, kopi robusta merupakan komoditas kopi yang lebih unggul dibandingkan dengan kopi arabika. Berdasarkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2016), secara rata-rata pada tahun 2001 – 2016, kontribusi kopi robusta terhadap produksi kopi nasional mencapai 82,49% setiap tahunnya. Salah satu provinsi sentra produksi kopi robusta perkebunan rakyat di Indonesia adalah Jawa Timur yang berkontribusi sebesar 7,38% dengan rata-rata produksi 35.814 ton per tahun. Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang sesuai untuk pengembangan komoditas kopi robusta. Hal ini didukung dengan jumlah produksi yang dimiliki oleh Kabupaten Malang. Pada tahun 2014, Kabupaten Malang menjadi daerah penghasil kopi robusta terbesar di Provinsi Jawa Timur dengan kontribusi mencapai 30,60% atau jumlah produksi sebesar 8.393 ton.

Berdasarkan data BPS (2016), Kecamatan Dampit tercatat sebagai sentra produksi terbesar kopi robusta di Kabupaten Malang. Pada tahun 2016, jumlah produksi kopi robusta yang dihasilkan yakni sebesar 2.280,30 ton. Jumlah produksi tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2015, yakni sebesar 367,66 ton (secara rinci ditunjukkan pada Lampiran 1). Produksi kopi Kecamatan Dampit telah diekspor hingga mancanegara: Amerika, Inggris, dan Cina dengan standar kualitas yang memenuhi pasar luar negeri (Gaeki, 2015). Keberadaan perkebunan kopi robusta di Kecamatan Dampit saat ini menjadi potensi yang luar biasa bagi pembangunan pertanian di Kabupaten Malang. Potensi tersebut tentunya harus

berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan petani kopi robusta di Kecamatan Dampit guna mewujudkan tujuan pembangunan pertanian. Dalam mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam mengatur sistem pertanian kopi di Indonesia.

Dalam menentukan kebijakan pertanian, pemerintah tentunya juga perlu mempertimbangkan preferensi para petani kopi agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Namun pada kenyataannya, masih terdapat kebijakan pertanian yang tidak sesuai dengan preferensi para petani kopi di Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut yaitu pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% bagi para eksportir kopi di Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2014 berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-24/-PJ/2014. Kebijakan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Suhardoyo *et al.* (2016), pemberlakuan PPN 10% tersebut akan berdampak pada penambahan modal bagi eksportir kopi. Selain penambahan modal bagi eksportir, produsen kopi juga merasakan dampak dari pemberlakuan PPN ini dalam skala mikro maupun makro.

Eriyanto, 2015 (*dalam* Suardoyo *et al.*, 2016: 110) menambahkan bahwa eksportir akan menurunkan harga kopi yang dibeli di tingkat petani akibat bertambahnya biaya ekspor. Hal inilah yang dialami oleh para petani kopi robusta di salah satu desa Kecamatan Dampit. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala desa, daya tawar petani kopi robusta tergolong masih rendah. Rendahnya harga kopi robusta di tingkat petani inilah yang menjadi kendala bagi para petani dalam memperoleh keuntungan sehingga hal tersebut dapat berdampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan petani.

Selain itu, menurut Mayrowani (2013), kendala lain yang dihadapi petani kopi saat ini dalam pengembangan mutu dan standardisasi hasil produksi adalah tidak berkembangnya sarana alat dan mesin pengolahan akibat masih tingginya harga alat dan mesin. Tambunan dan Sembiring (2007) menambahkan bahwa meskipun penggunaan alsin budidaya tanaman bukanlah hal yang baru dalam pertanian Indonesia, peraturan yang menaunginya masih sangat muda. Hal ini dapat dianggap sebagai wujud dari kurangnya perhatian terhadap pengembangan jenis sarana tersebut dalam mendukung perkembangan pertanian Indonesia.

Permasalahan tersebut sudah seharusnya menjadi bahan kajian bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan preferensi petani. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk mengetahui preferensi petani terhadap kebijakan pertanian yang diberlakukan.

Selama ini sudah terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang kebijakan pertanian dari berbagai sudut pandang. Penelitian tersebut dapat terbagi ke dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, penelitian mengenai evaluasi kebijakan tujuh gema revitalisasi dalam pembangunan pertanian (Saptana *et al.*, 2013). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan revitalisasi pertanian memerlukan adanya penyempurnaan, baik dalam aspek teknis, kelembagaan pengelola, pelaku usaha, dukungan pendanaan dan aspek sosial budaya, serta ekosistem pertanian. Harus ada konsistensi antara yang diformulasikan dalam rumusan kebijakannya dengan implementasinya di lapangan.

Kedua, penelitian mengenai preferensi petani terhadap kebijakan pertanian (Orazem *et al.*, 1988). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam kebanyakan kasus, dukungan yang diberikan petani terhadap suatu kebijakan konsisten dengan harapan mengenai bagaimana kebijakan tersebut dapat menguntungkan dirinya.

Ketiga, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat maupun petani terhadap kebijakan pertanian (Mittenzwei *et al.*, 2015; Variyam & Jordan, 1991; Orazem *et al.*, 1988). Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap kebijakan pertanian: latar belakang budaya dan sosial, persepsi mengenai kebijakan yang tidak memihak petani, serta persepsi mengenai pentingnya pertanian terhadap ekonomi, tekanan finansial, profitabilitas, dan pekerjaan sebagai petani. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi petani terhadap kebijakan pertanian yaitu situasi keuangan petani, pendidikan, dan pengalaman petani.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian mengenai analisis preferensi petani terhadap kebijakan pertanian menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi petani kopi robusta terhadap kebijakan pertanian. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tingkat kepentingan relatif petani kopi robusta terhadap aspek

kebijakan pertanian. Dengan adanya analisis tersebut, diharapkan pemerintah dapat menentukan kebijakan pertanian yang sesuai dengan preferensi dan tingkat kepentingan relatif petani kopi robusta.

1.2. Rumusan Masalah

Kopi robusta merupakan komoditas unggulan yang berkualitas di Kecamatan Dampit dan telah dikembangkan secara turun-temurun oleh petani kopi sejak tahun 1930. Komoditas tersebut telah memiliki label dan cukup terkenal di pasaran baik di tingkat nasional maupun internasional dengan nama Kopi Dampit atau *Dampit Coffee*. Menurut Nurafifah (2016), banyak *coffee shop* yang bermunculan menawarkan kopi Dampit menjadi salah satu menu. Kopi tersebut mempunyai tempat tersendiri di mata konsumen karena keunikan rasanya yang khas sehingga banyak orang yang menyukainya. Kecamatan Dampit berada pada ketinggian 500 – 600 mdpl dan merupakan dataran tinggi dengan lahan yang subur. Kondisi geografis Kecamatan Dampit yang berada di kawasan Amstirdam (akronim dari Ampelgading, Sumbermanjing, Tirtoyudo, dan Dampit) dan terletak berdekatan dengan pegunungan Semeru menjadikan Kecamatan Dampit sebagai salah satu tempat yang strategis dan sesuai untuk membudidayakan tanaman kopi jenis robusta.

Dibalik potensi yang dimiliki, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi para petani kopi robusta di salah satu desa Kecamatan Dampit. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala desa, daya tawar petani kopi robusta tergolong masih rendah akibat adanya kebijakan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% bagi para eksportir kopi. Rendahnya harga kopi robusta di tingkat petani inilah yang menjadi kendala bagi para petani dalam memperoleh keuntungan sehingga hal tersebut dapat berdampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan petani. Selain itu, kendala lain yang dihadapi saat ini dalam pengembangan mutu dan standardisasi hasil produksi adalah tidak berkembangnya sarana alat dan mesin pengolahan akibat masih tingginya harga alat dan mesin tersebut.

Kompleksnya permasalahan yang dihadapi petani kopi robusta di salah satu desa Kecamatan Dampit tersebut menuntut suatu pemecahan, salah satunya yaitu

melalui kebijakan pertanian yang lebih memihak petani. Sajogyo (2002) mengatakan, kebijakan yang diperlukan adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi pada setiap mata rantai agrobisnis komoditi pertanian. Informasi tentang apa yang diinginkan masyarakat dari kebijakan pertanian dianggap perlu dalam banyak hal. Pertama, informasi tersebut penting dalam mengukur tingkat pengeluaran pemerintah untuk kebijakan tersebut (Schokkaert, 1987 dalam Mittenzwei *et al.*, 2015: 62). Kedua, informasi tersebut diperlukan untuk target kebijakan pertanian yang lebih baik sesuai dengan persyaratan masyarakat terhadap pertanian. Ketiga, informasi tentang struktur dan penyebab preferensi masyarakat terhadap kebijakan pertanian dapat bermanfaat dalam memahami bagaimana preferensi dapat berubah dari waktu ke waktu karena adanya perkembangan populasi dan perubahan lainnya dalam masyarakat (Variyam *et al.*, 1990 dalam Mittenzwei *et al.*, 2015: 62). Oleh karena itu, analisis preferensi petani terhadap kebijakan pertanian penting untuk dilakukan agar pemerintah dapat menentukan kebijakan pertanian yang sesuai dengan preferensi petani.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, secara rinci permasalahan penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana preferensi petani kopi robusta terhadap kebijakan pertanian?
2. Bagaimana tingkat kepentingan relatif petani kopi robusta terhadap aspek kebijakan pertanian?

1.3. Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini memiliki batasan-batasan dengan tujuan untuk menghindari luasnya pokok bahasan. Oleh karena itu, batasan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas pada petani kopi robusta di salah satu desa Kecamatan Dampit.
2. Penelitian ini terbatas pada analisis preferensi petani terhadap kebijakan pertanian.
3. Penelitian ini terbatas pada analisis tingkat kepentingan relatif petani terhadap aspek kebijakan pertanian.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini, antara lain untuk:

1. Menganalisis preferensi petani kopi robusta terhadap kebijakan pertanian.
2. Menganalisis tingkat kepentingan relatif petani kopi robusta terhadap aspek kebijakan pertanian.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumber informasi dan masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan pertanian.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi peneliti selanjutnya.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penulis telah meninjau beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam mencermati masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penulis menunjukkan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya. Pemaparan mengenai peninjauan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat penulis, dijelaskan sebagai berikut.

Orazem *et al.* (1988) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis preferensi petani terhadap kebijakan pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode *Ordered Probit*. Kebijakan tersebut meliputi keberlanjutan program saat ini, penargetan bantuan keuangan kepada petani yang mengalami tekanan finansial paling parah, pengadopsian kontrol pasokan wajib, dan peralihan ke pasar bebas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa situasi keuangan petani, pendidikan, dan pengalaman petani secara signifikan mempengaruhi preferensinya terhadap kebijakan pertanian. Keberlanjutan program saat ini dan peralihan ke pasar bebas merupakan kebijakan yang paling disukai, sedangkan pengadopsian kontrol pasokan wajib dan penargetan bantuan keuangan kepada petani merupakan kebijakan yang paling tidak disukai.

Variyam & Jordan (1991) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana persepsi masyarakat mengenai kebijakan pertanian dapat mempengaruhi preferensi mereka terhadap program pemerintah. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode *Bootstrap*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi mengenai penyaluran sejumlah bantuan yang terlalu banyak kepada para petani besar dapat mempengaruhi preferensi secara negatif. Hal tersebut dapat mengakibatkan pendukung program pertanian menjadi menurun, hilangnya para petani kecil, dan implikasinya bagi struktur sektor pertanian masa depan. Persepsi mengenai pentingnya pertanian terhadap ekonomi, tekanan finansial dan profitabilitas, serta pekerjaan sebagai petani juga dapat mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap program pemerintah.

Saptana *et al.* (2013) melakukan penelitian mengenai evaluasi kebijakan tujuh gema revitalisasi dalam pembangunan pertanian yang ditetapkan Kementerian

Pertanian Indonesia. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat empat target pembangunan pertanian, yaitu revitalisasi lahan, revitalisasi perbenihan dan perbibitan, revitalisasi sumber daya pertanian, revitalisasi pembiayaan, revitalisasi kelembagaan petani, dan revitalisasi di bidang teknologi dan industri hilir. Kinerja implementasi revitalisasi pertanian meskipun sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik terutama dari peningkatan produksi pangan, namun masih menghadapi permasalahan-permasalahan pokok. Kebijakan revitalisasi pertanian memerlukan penyempurnaan, baik dalam aspek teknis, kelembagaan pengelola, pelaku usaha, dukungan pendanaan dan aspek sosial budaya, serta ekosistem pertanian. Harus ada konsistensi antara yang diformulasikan dalam rumusan kebijakannya dengan implementasinya di lapangan.

Mittenzwei *et al.* (2015) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat di Norway terhadap kebijakan pertanian dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Selama ini masih belum jelas diketahui faktor-faktor apa saja yang mendasari preferensi seseorang terhadap kebijakan pertanian dan bagaimana pemerintah harus menangani sektor primer. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa latar belakang budaya dan sosial jauh lebih berpengaruh dalam membentuk preferensi masyarakat terhadap kebijakan daripada tingkat pengetahuan berbasis fakta yang dimiliki seseorang. Latar belakang dan budaya sosial masyarakat dapat dinilai dari kedekatan sosial mereka dengan petani, memiliki asal-usul dari bidang pertanian, atau preferensi mereka terhadap makanan Norwegia.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaan tersebut terkait dengan topik penelitian yang dikaji yaitu mengenai preferensi petani terhadap kebijakan pertanian, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan lokasi penelitian.

2.2. Konsep Pembangunan Pertanian

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas (Siagian, 1994 *dalam* Riyadi dan Deddy, 2004).

Pembangunan pertanian merupakan suatu upaya peningkatan produksi pertanian melalui ketahanan pangan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani (Syahyuti, 2006). Pembangunan pertanian merupakan salah satu dari lima prioritas Program Pembangunan Nasional (Propenas).

Pembangunan nasional memiliki visi yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera khususnya petani melalui pembangunan sistem agribisnis dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralisis. Disamping itu, pembangunan pertanian memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani melalui pengembangan agribisnis, mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal, meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha secara adil melalui pengembangan agribisnis.

Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pembangunan pertanian di Indonesia yaitu: (1) potensi sumberdayanya yang besar dan beragam, (2) pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar, (3) besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini dan (4) menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Upaya untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga pertanian di pedesaan ditempuh melalui kebijakan pemerintah yang berupa: (i) peningkatan kualitas sumberdaya manusia, (ii) pengembangan infrastruktur di pedesaan, (iii) meningkatkan aksesibilitas modal bagi petani, dan (iv) pengembangan agribisnis (Syahyuti, 2006).

Mosher (1987) mengemukakan, terdapat syarat pokok dan syarat pelancar sebagai penentu keberhasilan pembangunan pertanian. Syarat pokok adalah semua komponen yang mutlak ada bagi terlaksananya pembangunan pertanian. Lima syarat pokok pembangunan, antara lain:

1. Teknologi yang senantiasa berkembang.
2. Pasar bagi hasil-hasil usahatani.
3. Tersedianya sarana produksi pertanian secara lokal.
4. Perangsang produksi bagi petani, yaitu adanya suatu perangsang agar petani turut serta, seperti kebijakan.
5. Transportasi.

Syarat pelancar dalam pembangunan pertanian, yaitu hal yang dapat menyempurnakan metode-metode kerja dalam usaha memperlancar pembangunan pertanian. Syarat pelancar dalam pembangunan pertanian, antara lain: pendidikan pembangunan, kredit produksi, kegiatan bersama (kelompok) oleh petani, perbaikan dan perluasan areal lahan pertanian dan perencanaan nasional pembangunan pertanian.

2.3. Kebijakan Pembangunan Pertanian

2.3.1. Bidang Cakupan

Kebijakan pembangunan pertanian ialah keputusan dan tindakan pemerintah untuk mengarahkan, mendorong, mengendalikan dan mengatur pembangunan pertanian guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan pertanian haruslah dipandang dalam konteks pembangunan nasional yang tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan petani saja tetapi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, kebijakan pembangunan pertanian termasuk dalam kategori kebijakan publik, dilakukan oleh pemerintah dan berpengaruh terhadap kehidupan orang banyak (Simatupang, 2003).

Dalam perekonomian modern, seperti perekonomian Indonesia saat ini, keragaan sektor-sektor ekonomi saling mempengaruhi dan keragaan perekonomian dalam negeri sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian internasional. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang dibuat pada sektor nonpertanian berpengaruh nyata terhadap keragaan pembangunan pertanian, dan demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, kebijakan perkreditan dan kurs mata uang yang merupakan kebijakan moneter jelas sangat berpengaruh terhadap keragaan pembangunan sektor pertanian. Kebijakan investasi industri perkapalan, yang merupakan kebijakan pembangunan sektor industri, yang sangat berpengaruh terhadap keragaan sektor pertanian, sementara kebijakan harga pupuk, yang merupakan kebijakan sektor pertanian, jelas sangat berpengaruh terhadap keragaan industri pupuk, yang berarti pula keragaan pembangunan sektor industri. Dengan demikian, cakupan kebijakan pembangunan pertanian tidak dapat dibatasi berdasarkan

delineasi sektoral maupun secara jenjang organisasi pemerintahan (Simatupang, 2003).

Dasar delineasi yang lebih tepat dalam menentukan cakupan kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan ialah pendekatan fungsional. Secara umum dapat dikatakan bahwa semua keputusan dan tindakan pemerintah yang secara fungsional berpengaruh nyata terhadap keragaan pembangunan pertanian termasuk dalam kategori kebijakan pembangunan pertanian. Kebijakan perkreditan, kurs mata uang, dan bahkan pembangunan jalan raya, pelabuhan, kelistrikan, maupun jaringan telekomunikasi termasuk dalam kebijakan pembangunan pertanian. Jelaslah, cakupan kebijakan pembangunan pertanian sangatlah luas, yang dapat dikelompokkan ke dalam tujuh bidang atau "tujuh inti" pembangunan pertanian: inovasi, input, investasi dan modal kerja, insentif, infrastruktur, institusi dan industri (Tabel 1).

Tabel 1. Bidang, Generik dan Instansi Pembuat Kebijakan Pertanian

Bidang	Generik / Instrumen	Departemen / Lembaga Berwenang
1. Inovasi teknologi	1. Penelitian dan pengembangan teknologi	Deptan, LIPI, Menristek, Pemda
	2. Penyuluhan	Deptan, Pemda
	3. Pendidikan	Depdiknas, Deptan
2. Input	1. Penataan sistem penyediaan input	Deperindag
	2. Pengendalian harga input (subsidi, pajak)	Depkeu, Deperindag, Pemda

Tabel 1. (Lanjutan)

Bidang	Generik / Instrumen	Departemen / Lembaga Berwenang
3. Investasi dan modal	1. Pengembangan lembaga keuangan pertanian	BI, Depkeu
	2. Penyediaan kredit investasi dan modal kerja	BI, Depkeu, Pemda
	3. Pengendalian suku bunga	BI, Depkeu
	4. Promosi dan pengaturan investasi	BKPM, Pemda
5. Insentif	1. Dukungan harga output	Menko Ekuin
	2. Pajak (PPN, pajak ekspor / impor, cukai)	Mekeu, Pemda
	3. Retribusi	Pemda
	4. Regulasi perdagangan	Deperindag
5. Infrastruktur	1. Pembangunan irigasi	Depkimpraswil, Pemda
	2. Transportasi dan telekomunikasi	Dephubtel
	3. Kelistrikan	Deptamben
4. Institusi (termasuk aturan pengelolaan sumberdaya)	1. Pengembangan kelompok / organisasi	Pemda, Deplutkan
	2. Pengembangan sistem kemitraan usaha	Pemda, Deplutkan
	3. Pengembangan hukum dan peraturan	Deptan, DPR, Pemda, DPRD
	4. Lisensi penangkapan ikan	Deptan
5. Industri	1. Pengembangan perikanan	Deperindag, Pemda

(Sumber: Simatupang, 2003)

Sudah barang tentu, kebijakan pembangunan pertanian dapat dipilah sehingga lebih spesifik, misalnya menurut sub-sektor (seperti kebijakan pembangunan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan) dan atau menurut komoditas (kebijakan perberasan, perunggasan). Hal penting yang perlu dicatat ialah bahwa cakupan kebijakan pembangunan pertanian tidak dibatasi oleh cakupan sektor atau cakupan mandat departemen pemerintahan tetapi fungsi kebijakanlah yang menentukannya. Dengan demikian, cakupan kebijakan pembangunan pertanian lebih luas dari cakupan kebijakan sektoral pertanian. Kebijakan sektoral hanya meliputi kebijakan yang khusus berkenaan dengan pembangunan pertanian. Kebijakan sektoral tidak termasuk kebijakan di luar sektor pertanian seperti ekonomi makro (misalnya kurs, suku bunga perbankan), kebijakan industri, pembangunan transportasi, kelistrikan, dan sebagainya (Simatupang, 2003).

2.3.2. Aspek Teknis Produksi

Kebijakan pertanian perlu ditinjau dari berbagai aspek, salah satunya yaitu aspek teknis produksi. Beberapa kebijakan pertanian yang terkait dengan aspek teknis produksi diantaranya yaitu kebijakan pembangunan irigasi, kebijakan bantuan alsintan, dan pembuatan pupuk organik. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Republik Indonesia telah menyusun pedoman teknis sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan yang terkait dengan aspek teknis produksi tersebut.

Dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan irigasi, Ditjen PSP berusaha untuk membantu meningkatkan pemberdayaan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan Pengembangan Jaringan dengan membangun irigasi baru dan / atau meningkatkan jaringan irigasi yang sudah ada pada lahan pertanian yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan alsintan, Ditjen PSP mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk penyediaan alsintan berupa alat dan mesin pertanian dimana jenis dan spesifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan petani.

Dalam pelaksanaan kebijakan pembuatan pupuk organik, upaya pemerintah untuk mendukung petani dalam kemandirian mengembangkan pupuk organik adalah dengan memfasilitasi kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dengan fasilitas berupa bangunan rumah kompos, bangunan bak fermentasi, alat pengolah pupuk organik (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang ternak komunal dan ternak sapi.

2.3.3. Aspek Ekonomi Produksi

Beberapa kebijakan pertanian yang terkait dengan aspek ekonomi produksi diantaranya yaitu kebijakan harga pupuk, kebijakan harga benih / bibit, dan kebijakan pasca panen. Dalam pelaksanaan kebijakan harga pupuk, sebagaimana menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 17/M-DAG/PER/6/2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, pemerintah mengawasi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diantaranya meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya. Pemerintah juga menetapkan harga

tertinggi pupuk bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg di Lini IV yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan / atau petani.

Dalam pelaksanaan kebijakan harga benih / bibit, sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, pemerintah menetapkan penjualan Benih / Bibit Dasar (BD) kopi robusta dengan ketentuan seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
Kopi robusta asal biji umur 18 – 12 bulan	per pohon	Rp 3.000,00
Kopi robusta asal stek umur 18 – 12 bulan	per pohon	Rp 3.600,00
Entres kopi robusta	per entres	Rp 2.000,00

(Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016)

2.3.4. Aspek Kelembagaan Pertanian

Beberapa kebijakan pertanian yang terkait dengan aspek kelembagaan pertanian diantaranya yaitu penguatan kelembagaan petani dan pengembangan koperasi tani. Dalam pelaksanaan kebijakan penguatan kelembagaan petani, sebagaimana menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, upaya penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani. Oleh karena itu, petani dapat menumbuhkembangkan kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.

Sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan pengembangan koperasi tani, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian Republik Indonesia menyusun pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Berdasarkan pedoman tersebut, koperasi tani sebagai Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani, dan paling sedikit bertugas; menyusun kelayakan usaha, mengembangkan kemitraan usaha, dan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

2.3.5. Aspek Kelestarian Lingkungan

Beberapa kebijakan pertanian yang terkait dengan aspek kelestarian lingkungan diantaranya yaitu kebijakan konservasi lahan dan penyelamatan keanekaragaman. Dalam pelaksanaan kebijakan konservasi lahan, sebagaimana menurut Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Republik Indonesia, upaya pemeliharaan keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumberdaya tanah diperlukan agar senantiasa tersedia dalam kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Dalam pelaksanaan kebijakan penyelamatan keanekaragaman, sebagaimana menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, upaya penganeekaragaman usaha diperlukan bagi petani untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengutamakan usaha di bidang perkebunan.

2.3.6. Proses Pembuatan

Kebijakan pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Dalam tatanan kenegaraan Indonesia, kebijakan pembangunan nasional dirancang secara bertahap. Sebagai suatu negara yang demokratis, landasan konstitusional dan operasional pembangunan nasional ditetapkan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Landasan operasional ditetapkan MPR dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk masa lima tahun. Rencana dan pelaksanaan pembangunan nasional selanjutnya dilakukan oleh pemerintah yang dipimpin oleh presiden yang dibantu oleh para menteri pemimpin departemen pemerintahan. Rencana pembangunan nasional disusun secara *integrative* dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) untuk masa lima tahun. PROPENAS selanjutnya dirinci dalam rencana strategis (RENSTRA) pembangunan sektoral, termasuk rencana pembangunan pertanian tahunan (REPETA). Dengan demikian, kebijakan pembangunan pertanian disusun secara hierarkis dan integratif dengan kebijakan pembangunan sektor-sektor lainnya. Evaluasi pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Simatupang, 2003).

Dari mekanisme perumusannya seperti yang diuraikan di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan pertanian merupakan keputusan politik yang dibuat pada arena pasar politik (*political market place*). Di satu sisi, para pembuat kebijakan (eksekutif dan legislatif) adalah para politisi rasional yang selalu berusaha mempertahankan kedudukannya dengan menawarkan kebijakan dalam rangka meraih dukungan politik dari masyarakat madani (*civil society*), termasuk kelompok lobbi-kepentingan dan organisasi massa) secara umum dan golongan politiknya masing-masing secara khusus. Di sisi lain, masyarakat madani melakukan pendekatan dan penekanan agar para pengambil keputusan membuat kebijakan yang menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran terhadap kebijakan inilah yang akhirnya menentukan sosok kebijakan yang dibuat pemerintah dan atau bersama-sama dengan DPR. Proses pembuatan kebijakan ini berada dalam domain (lingkup) politik dan tidak berimpit domain analisis kebijakan (Simatupang, 2003).

2.4. Preferensi Petani Terhadap Kebijakan Pertanian

Preferensi adalah suatu sikap yang lebih menyukai sesuatu benda daripada benda lainnya. Penilaian preferensi adalah teknik penelitian dengan menyajikan dua atau lebih perangsang yang harus dipilih subjek yang diukur melalui tes lisan (Chaplin, 2002). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa preferensi petani terhadap kebijakan pertanian merupakan sikap petani yang lebih menyukai suatu kebijakan pertanian daripada kebijakan pertanian lainnya.

Ketika bertindak dan beraksi, seorang individu memiliki rencana yang koheren dan mencoba untuk memaksimalkan kepuasan dirinya sesuai dengan preferensi yang dia miliki, serta sedapat mungkin meminimalkan biaya yang dibutuhkan. Rasionalitas mengimplikasikan “asumsi keterkaitan” yang menyatakan bahwa individu memiliki suatu “urutan preferensi” dari berbagai macam opsi yang ada. Dari urutan pilihan tersebut, para ilmuwan sosial menyimpulkan adanya suatu “fungsi nilai (*utility function*)” yang mengatribusikan satu nomor pada setiap opsi menurut tingkatan di dalam urutan preferensi. Untuk bisa dikatakan rasional, urutan preferensi seseorang haruslah memenuhi kriteria tertentu. Prinsip transitivitas

merupakan salah satu contoh dari kriteria tersebut: preferensi X atas Y dan Y atas Z seharusnya mengimplikasikan adanya preferensi X atas Z (Wirawan, 2012).

Rational choice explanations memerhatikan perilaku individu dengan merujuk pada keyakinan dan preferensi subjektif seorang individu, bukan pada kondisi objektif yang dihadapi oleh individu tersebut. Maka adalah sesuatu yang mungkin terjadi bahwa seseorang bertindak secara rasional sementara ia bertumpu pada keyakinan yang salah. Hal ini dikarenakan adanya pencarian atas alat / sarana terbaik untuk mencapai tujuan atau keinginannya. Walaupun demikian, untuk bisa dikatakan rasional seseorang diharapkan bisa mengumpulkan informasi untuk membuktikan keyakinannya (Wirawan, 2012).

Pertanian adalah sektor di mana pemerintah sangat berpengaruh terhadap biaya signifikan warga negara baik sebagai konsumen maupun pembayar pajak. Informasi tentang apa yang diinginkan masyarakat dari kebijakan pertanian dianggap perlu dalam banyak hal. Pertama, informasi tersebut penting dalam mengukur tingkat pengeluaran pemerintah untuk kebijakan tersebut (Schokkaert, 1987 dalam Mittenzwei, 2015: 62). Kedua, informasi tersebut diperlukan untuk target kebijakan pertanian yang lebih baik sesuai dengan persyaratan masyarakat terhadap pertanian. Ketiga, informasi tentang struktur dan penyebab preferensi masyarakat terhadap kebijakan pertanian dapat bermanfaat dalam memahami bagaimana preferensi dapat berubah dari waktu ke waktu karena adanya perkembangan populasi dan perubahan lainnya dalam masyarakat (Variyam *et al.*, 1990 dalam Mittenzwei, 2015: 62).

III. KERANGKA KONSEP PENELITIAN

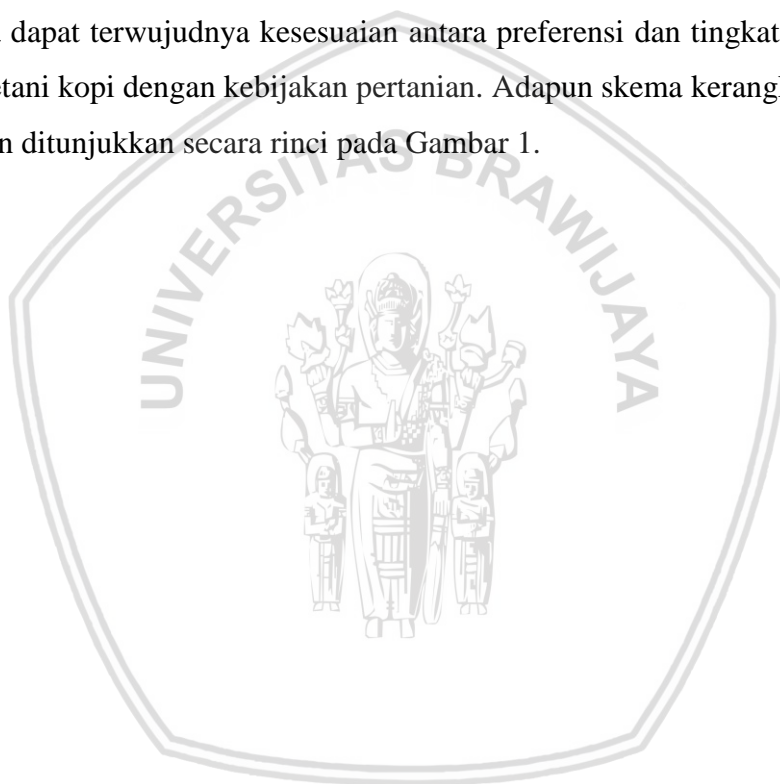
3.1. Kerangka Pemikiran

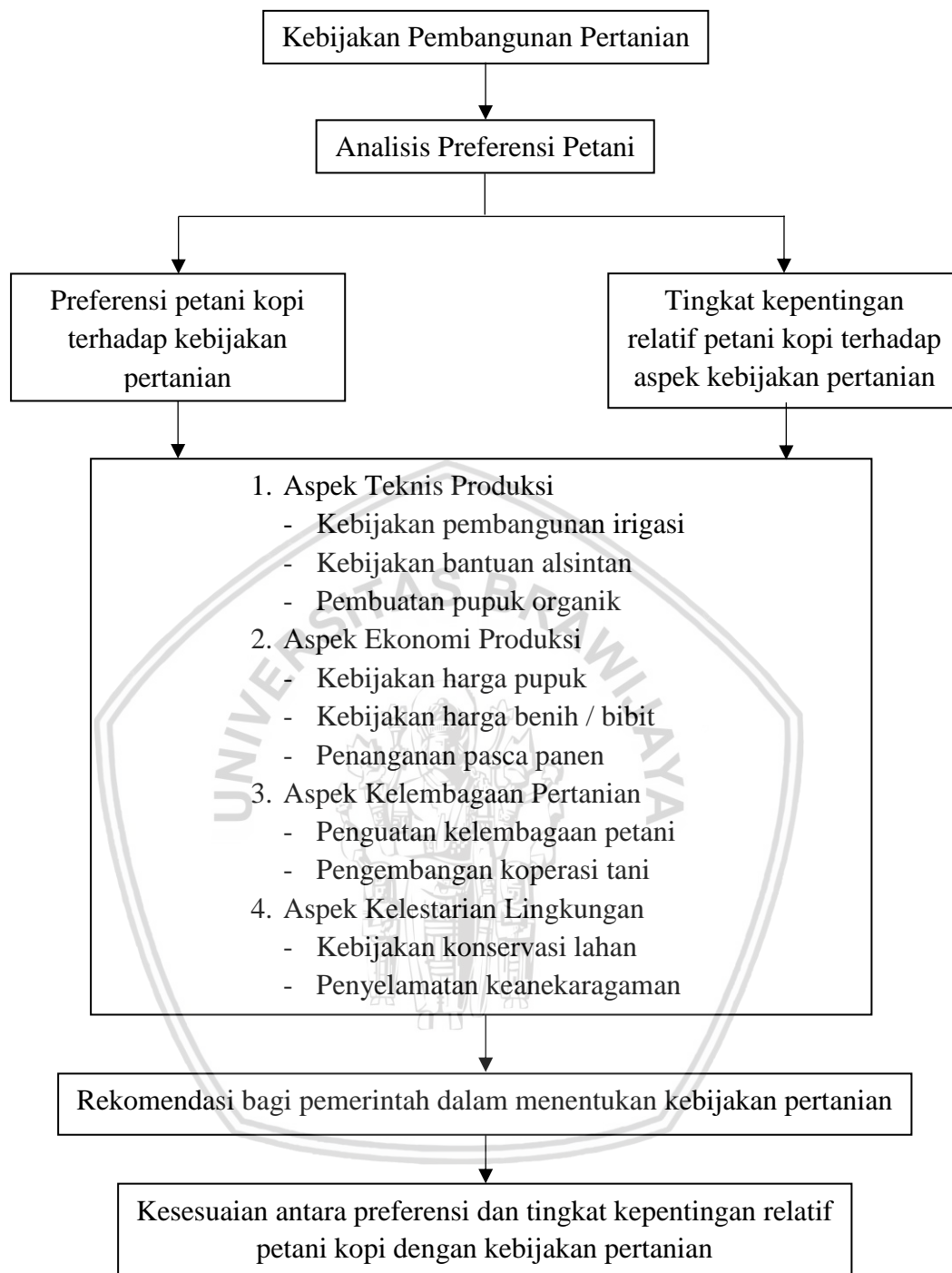
Kebijakan pembangunan pertanian ialah keputusan dan tindakan pemerintah untuk mengarahkan, mendorong, mengendalikan dan mengatur pembangunan pertanian guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional (Simatupang, 2003). Kebijakan pertanian diperlukan bagi para petani dalam meningkatkan kesejahteraan mereka guna mewujudkan tujuan pembangunan pertanian. Menurut Tambunan dan Sembiring (2007), pembangunan pertanian dewasa ini tidak lagi dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi alat dan mesin pertanian. Berbagai kajian telah menyimpulkan bahwa alat dan mesin pertanian merupakan kebutuhan utama sektor pertanian sebagai akibat dari kelangkaan tenaga kerja di pedesaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek teknis produksi merupakan faktor terpenting bagi petani dalam menilai sebuah kebijakan pertanian.

Pilihan suka atau tidaknya seorang petani terhadap suatu kebijakan pertanian dapat diketahui melalui analisis preferensi petani. Sedangkan penting atau tidaknya suatu aspek kebijakan pertanian bagi seorang petani dapat diketahui melalui analisis tingkat kepentingan relatif. Analisis tersebut dianggap perlu sebagai rekomendasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pertanian yang sesuai dengan preferensi dan tingkat kepentingan relatif petani, seperti halnya pada petani kopi robusta di salah satu desa Kecamatan Dampit.

Analisis preferensi dan tingkat kepentingan relatif petani kopi robusta dilakukan penulis dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Saptana *et al.* (2013). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saptana *et al.* (2013), kebijakan revitalisasi pertanian memerlukan adanya penyempurnaan, baik dalam aspek teknis, kelembagaan pengelola, pelaku usaha, dukungan pendanaan dan aspek sosial budaya, serta ekosistem pertanian. Dalam penelitian ini, beberapa aspek kebijakan yang digunakan untuk mengetahui preferensi dan tingkat kepentingan relatif petani kopi diantaranya yaitu aspek teknis produksi, aspek ekonomi produksi, aspek kelembagaan pertanian, dan aspek kelestarian lingkungan.

Kebijakan yang termasuk ke dalam aspek teknis produksi yaitu kebijakan pembangunan irigasi, kebijakan bantuan alsintan, dan pembuatan pupuk organik. Kebijakan yang termasuk ke dalam aspek ekonomi produksi yaitu kebijakan harga pupuk, kebijakan harga benih / bibit, dan penanganan pasca panen. Kebijakan yang termasuk ke dalam aspek kelembagaan pertanian yaitu penguatan kelembagaan petani dan pengembangan koperasi tani. Sedangkan kebijakan yang termasuk ke dalam aspek kelestarian lingkungan yaitu kebijakan konservasi lahan dan penyelamatan keanekaragaman. Hasil dari analisis tersebut diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pertanian sehingga dapat terwujudnya kesesuaian antara preferensi dan tingkat kepentingan relatif petani kopi dengan kebijakan pertanian. Adapun skema kerangka pemikiran penelitian ditunjukkan secara rinci pada Gambar 1.





Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

3.2. Hipotesis

Hipotesis yang dapat diambil berdasarkan tujuan dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan yaitu aspek teknis produksi merupakan faktor terpenting bagi petani dalam menilai sebuah kebijakan pertanian.

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan definisi operasional untuk memudahkan pengumpulan data. Definisi operasional dan pengukuran dari setiap variabel dalam penelitian dijelaskan pada tabel 3 hingga tabel 6.

Tabel 3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Aspek Teknis Produksi

Variabel	Definisi Operasional Variabel	Pengukuran Variabel	Indikator Pengukuran Variabel
Aspek Teknis Produksi	Kebijakan pertanian yang meliputi kebijakan bantuan benih / bibit, kebijakan pembangunan irigasi, dan perbaikan teknologi usahatani demo plot.	5 = sangat diinginkan 4 = diinginkan 3 = agak diinginkan 2 = tidak diinginkan 1 = sangat tidak diinginkan	5 = Kebijakan bermanfaat, tidak terdapat kekurangan, dan merupakan prioritas utama. 4 = Kebijakan bermanfaat dan tidak memiliki kekurangan namun bukan prioritas utama.
	Kebijakan pembangunan irigasi	5 = sangat diinginkan 4 = diinginkan 3 = agak diinginkan 2 = tidak diinginkan 1 = sangat tidak diinginkan	3 = Kebijakan bermanfaat namun memiliki kekurangan.
	Kebijakan pemberian bantuan berupa alat dan mesin pertanian	5 = sangat diinginkan 4 = diinginkan 3 = agak diinginkan 2 = tidak diinginkan 1 = sangat tidak diinginkan	2 = Kebijakan tidak bermanfaat namun tidak membebani petani.
	Kebijakan bantuan alsintan	5 = sangat diinginkan 4 = diinginkan 3 = agak diinginkan 2 = tidak diinginkan 1 = sangat tidak diinginkan	1 = Kebijakan tidak bermanfaat dan membebani petani.

Tabel 3. (Lanjutan)

Variabel	Definisi Operasional Variabel	Pengukuran Variabel	Indikator Pengukuran Variabel
Pembuatan pupuk organik	Kebijakan yang terkait dengan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), yaitu pemberian fasilitas berupa bangunan rumah kompos, bangunan bak fermentasi, alat pengolah pupuk organik (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang ternak komunal dan ternak sapi.	5 = sangat diinginkan 4 = diinginkan 3 = agak diinginkan 2 = tidak diinginkan 1 = sangat tidak diinginkan	5 = Kebijakan bermanfaat, tidak terdapat kekurangan, dan merupakan prioritas utama.
			4 = Kebijakan bermanfaat dan tidak memiliki kekurangan namun bukan prioritas utama.
			3 = Kebijakan bermanfaat namun memiliki kekurangan.
			2 = Kebijakan tidak bermanfaat namun tidak membebani petani.
			1 = Kebijakan tidak bermanfaat dan membebani petani.

Tabel 4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Aspek Ekonomi Produksi

Variabel	Definisi Operasional Variabel	Pengukuran Variabel	Indikator Pengukuran Variabel
Aspek Ekonomi Produksi	Kebijakan pertanian yang meliputi harga pupuk, harga hasil pertanian, dan penanganan pasca panen.	5 = sangat diinginkan 4 = diinginkan 3 = agak diinginkan 2 = tidak diinginkan 1 = sangat tidak diinginkan	5 = Kebijakan bermanfaat, tidak terdapat kekurangan, dan merupakan prioritas utama.
Kebijakan harga pupuk	Kebijakan dimana pemerintah menjual pupuk dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga normal.	5 = sangat diinginkan 4 = diinginkan 3 = agak diinginkan 2 = tidak diinginkan 1 = sangat tidak diinginkan	4 = Kebijakan bermanfaat dan tidak memiliki kekurangan namun bukan prioritas utama.
Kebijakan harga benih / bibit	Kebijakan dimana pemerintah menjual benih / bibit kopi robusta dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga normal.	5 = sangat diinginkan 4 = diinginkan 3 = agak diinginkan 2 = tidak diinginkan 1 = sangat tidak diinginkan	3 = Kebijakan bermanfaat namun memiliki kekurangan. 2 = Kebijakan tidak bermanfaat namun tidak membebani petani.
Penanganan pasca panen	Kebijakan yang terkait dengan pedoman penanganan pasca panen kopi dengan memberikan acuan secara teknis mengenai penanganan pasca panen kopi secara baik dan benar bagi petani.	5 = sangat diinginkan 4 = diinginkan 3 = agak diinginkan 2 = tidak diinginkan 1 = sangat tidak diinginkan	1 = Kebijakan tidak bermanfaat dan membebani petani.

Tabel 5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Aspek Kelembagaan Pertanian

Variabel	Definisi Operasional Variabel	Pengukuran Variabel	Indikator Pengukuran Variabel
Aspek Kelembagaan Pertanian	Kebijakan pertanian yang meliputi pengembangan pertanian kawasan dan pengembangan koperasi tani.	5 = sangat diinginkan 4 = diinginkan 3 = agak diinginkan 2 = tidak diinginkan 1 = sangat tidak diinginkan	5 = Kebijakan bermanfaat, tidak terdapat kekurangan, dan merupakan prioritas utama.
	Penguatan kelembagaan petani	5 = sangat diinginkan 4 = diinginkan 3 = agak diinginkan 2 = tidak diinginkan 1 = sangat tidak diinginkan	4 = Kebijakan bermanfaat dan tidak memiliki kekurangan namun bukan prioritas utama.
	Pengembangan koperasi tani	5 = sangat diinginkan 4 = diinginkan 3 = agak diinginkan 2 = tidak diinginkan 1 = sangat tidak diinginkan	3 = Kebijakan bermanfaat namun memiliki kekurangan. 2 = Kebijakan tidak bermanfaat namun tidak membebani petani. 1 = Kebijakan tidak bermanfaat dan membebani petani.

Tabel 6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Aspek Kelestarian Lingkungan

Variabel	Definisi Operasional Variabel	Pengukuran Variabel	Indikator Pengukuran Variabel
Aspek Kelestarian Lingkungan	Kebijakan pertanian yang meliputi kebijakan konservasi lahan dan penyelamatan keanekaragaman.	5 = sangat diinginkan 4 = diinginkan 3 = agak diinginkan 2 = tidak diinginkan 1 = sangat tidak diinginkan	5 = Kebijakan bermanfaat, tidak terdapat kekurangan, dan merupakan prioritas utama.
	Kebijakan yang terkait dengan upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumberdaya tanah agar senantiasa tersedia dalam kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.	5 = sangat diinginkan 4 = diinginkan 3 = agak diinginkan 2 = tidak diinginkan 1 = sangat tidak diinginkan	4 = Kebijakan bermanfaat dan tidak memiliki kekurangan namun bukan prioritas utama.
Kebijakan konservasi lahan	Kebijakan yang terkait dengan upaya penganekaragaman usaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengutamakan usaha di bidang perkebunan.	5 = sangat diinginkan 4 = diinginkan 3 = agak diinginkan 2 = tidak diinginkan 1 = sangat tidak diinginkan	3 = Kebijakan bermanfaat namun memiliki kekurangan.
	Penyelamatan keanekaragaman	5 = sangat diinginkan 4 = diinginkan 3 = agak diinginkan 2 = tidak diinginkan 1 = sangat tidak diinginkan	2 = Kebijakan tidak bermanfaat namun tidak membebani petani. 1 = Kebijakan tidak bermanfaat dan membebani petani.

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan survei. Metode deskriptif dilaksanakan dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena yang berlangsung tanpa adanya rekayasa dan manipulasi keadaan. Metode survei dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari beberapa orang terhadap topik terkait. Tujuan dari survei adalah untuk menggeneralisasi populasi dari beberapa sampel sehingga dapat dibuat kesimpulan / dugaan sementara tentang karakteristik, perilaku, atau sikap dari populasi tersebut.

4.2. Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur yang ditentukan secara *purposive*. Pertimbangan pemilihan provinsi Jawa Timur adalah karena provinsi Jawa Timur adalah salah satu sentra produksi kopi robusta perkebunan rakyat di Indonesia yang berkontribusi sebesar 7,38% dengan rata-rata produksi 35.814 ton per tahun (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2016). Selanjutnya, Kabupaten Malang dipilih karena berdasarkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2016), Kabupaten Malang merupakan daerah penghasil kopi robusta terbesar di Provinsi Jawa Timur dengan kontribusi mencapai 30,60% atau jumlah produksi sebesar 8.393 ton. Kecamatan Dampit dipilih karena pada tahun 2016, Kecamatan Dampit tercatat sebagai sentra produksi terbesar kopi robusta di Kabupaten Malang dengan jumlah produksi yang dihasilkan yakni sebesar 2.280,30 ton (BPS, 2016). Pertimbangan pemilihan Desa Srimulyo sebagai daerah penelitian adalah karena berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari kantor desa, kondisi geografis Kecamatan Dampit yang berada pada ketinggian 500 – 600 mdpl dan merupakan dataran tinggi dengan lahan yang subur menjadikan Kecamatan Dampit sebagai salah satu tempat yang strategis dan sesuai untuk membudidayakan tanaman kopi jenis robusta. Waktu penelitian di Desa Srimulyo dilaksanakan pada bulan September 2017 hingga bulan Januari 2018.

4.3. Teknik Penentuan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh petani kopi yang ada di Dusun Purwosari, Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Jumlah seluruh petani kopi yang ada di Dusun Purwosari berjumlah 492 orang. Metode penentuan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling*, yaitu proses pengambilan sampel sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Metode *simple random sampling* dipilih karena rata-rata penguasaan lahan anggota populasi homogen. Cara pengukuran yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel agar sampel yang diambil dapat mewakili keseluruhan populasi ditentukan dengan rumus yang dikemukakan oleh Parel *et al.* (1973). Adapun rumus Parel *et al.* (1973) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{NZ^2\sigma^2}{Nd^2 + Z^2\sigma^2}$$

Keterangan:

- n = ukuran sampel minimum
- N = jumlah populasi
- Z = nilai di tingkat kepercayaan tertentu, yaitu 95% (dengan nilai sebesar 1.96)
- σ^2 = nilai varians dari populasi
- d = kesalahan maksimum yang ditoleransi (5%)

Langkah awal dalam menghitung jumlah sampel penelitian, dilakukan dengan mengukur varians populasi (σ^2). Namun, varians populasi tidak diketahui sehingga digunakan varians sampel (s^2) sebagai gantinya, dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{NZ^2s^2}{Nd^2 + Z^2s^2}$$

Keterangan:

- s^2 = nilai varians dari sampel

Perhitungan varians sampel (s^2) dalam penelitian ini menggunakan sampel kecil (n) sejumlah 20 petani yang keragamannya didasarkan pada keragaman luas lahan. Rumus untuk menghitung varians dari sampel ditunjukkan pada persamaan:

$$s^2 = \frac{n \sum X^2 - (\sum X)^2}{n(n-1)}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel minimum

N = jumlah populasi

Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh nilai varians dari sampel sebesar 0,0335. Selanjutnya, dilakukan penghitungan sampel minimal yang harus diambil dari total populasi dan diperoleh jumlah sampel yang digunakan agar dapat mewakili keseluruhan populasi adalah 47 orang. Prosedur perhitungan sampel disajikan pada Lampiran 2.

4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan, yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan masing-masing data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer menurut Noor (2013) merupakan data yang didapat langsung dari sumbernya. Data primer yang diambil penulis berupa identitas rumah tangga dan usahatani. Teknik pengambilan data primer dilaksanakan melalui wawancara dengan kuesioner, pengamatan (observasi), dan dokumentasi.

- a. Wawancara dengan kuesioner, wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan tanya-jawab dengan responden secara langsung yang pertanyaannya telah disusun dengan opsi yang tersedia dalam bentuk kuesioner yang disajikan pada Lampiran 3.
- b. Pengamatan (observasi), observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati kegiatan petani, sarana prasarana, serta kondisi lingkungan yang ada di lokasi penelitian secara langsung.
- c. Dokumentasi, dokumentasi pada penelitian ini dilaksanakan dengan mengabadikan aktivitas selama penelitian berlangsung dalam bentuk foto sebagai penunjang seluruh informasi yang didapatkan.

2. Data Sekunder

Siagian dan Sugiarto (2006) mendefinisikan data sekunder sebagai data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih

lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, penelusuran melalui internet, instansi terkait (Kantor desa, Dinas Pertanian, Kecamatan, BPS, dan lain-lain), penelitian terdahulu, dan literatur-literatur yang berkaitan. Adapun data sekunder yang digunakan, yaitu jumlah produksi kopi robusta Kabupaten Malang dari BPS, keadaan geografi desa dari Kantor Desa Srimulyo dan sebagainya.

4.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif atau disebut juga dengan teknik statistik, digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk angka, baik hasil pengukuran maupun hasil mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Tujuan dari teknik analisis data adalah untuk menjawab tujuan penelitian. Berikut merupakan uraian mengenai teknik analisis data yang digunakan:

4.5.1. Analisis Konjoin

Menurut Churchill (2005), metode *conjoint* merupakan suatu metode dimana nilai yang diberikan responden disimpulkan dari preferensi terhadap kombinasi atribut yang ditetapkan peneliti. Hair *et al.* (2010) berpendapat bahwa penelitian yang didasarkan analisis konjoin mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam merancang stimuli yang kemudian dievaluasi oleh responden. Rancangan stimuli melibatkan rincian variabel konjoin dengan memilih beberapa faktor dan level untuk dimasukkan dalam merancang stimuli.

Tahapan dalam merancang dan melaksanakan analisis konjoin (Aaker *et al.*, 2003; Santoso, 2010; Winston, 2014) adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan atribut dan taraf atribut

Tahap awal pada analisis konjoin adalah pemilihan atribut dan taraf yang akan digunakan dalam merancang stimuli. Masing-masing atribut memiliki taraf spesifik yang menyertainya. Cara yang paling sering ditempuh dalam

menentukan atribut ini biasanya dengan diskusi pakar, eksplorasi data sekunder atau melakukan penelitian pendahuluan.

Penetapan atribut dan level merupakan hal yang sangat penting dalam memulai penelitian konjoin. Menurut Supranto (2010) terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan atribut dan level yang akan dipilih, yaitu:

a. *Actionable Measure*

Atribut dan level harus bisa ditetapkan dalam praktek, artinya atribut dan level harus berbeda, tidak boleh samar dan mewakili suatu konsep yang diterapkan.

b. *Communicable Measure*

Atribut dan level harus dapat dikomunikasikan dengan mudah.

c. Jumlah atribut dan level

Jumlah atribut dan level yang digunakan secara langsung mempengaruhi efisiensi dan reliabilitas dari hasil penelitian. Dengan bertambahnya atribut dan level, jumlah parameter yang akan diestimasi meningkat sehingga membutuhkan jumlah stimuli yang lebih besar atau pengurangan reliabilitas dari parameter.

d. Jumlah level yang seimbang

Dalam perancangan stimuli, keseimbangan jumlah dari atribut dan level harus dijaga sebaik mungkin. Jika suatu variabel memiliki jumlah kategori yang terlalu banyak maka akan menyebabkan konsumen lebih berfokus pada variabel tersebut dibandingkan variabel lainnya. Adapun atribut dan level dalam penelitian ditunjukkan pada tabel 7.

Tabel 7. Atribut dan Level

Atribut	Level
1. Aspek Teknis Produksi	1. Kebijakan pembangunan irigasi 2. Kebijakan bantuan alsintan 3. Pembuatan pupuk organik
2. Aspek Ekonomi	1. Kebijakan harga pupuk 2. Kebijakan harga benih / bibit 3. Pengembangan penanganan pasca panen
3. Aspek Kelembagaan	1. Penguatan kelembagaan petani 2. Pengembangan koperasi tani
4. Aspek Kelestarian Lingkungan	1. Kebijakan konservasi lahan 2. Penyelamatan keanekaragaman

2. Perancangan stimuli

Stimuli merupakan kombinasi dari taraf atribut yang satu dengan taraf atribut yang lainnya. Pada penelitian ini, perancangan stimuli yang digunakan yaitu pendekatan *full profile*. Metode *full profile* adalah metode yang menyajikan keseluruhan kemungkinan kombinasi dan level-level atributnya. Setiap stimuli dipresentasikan secara terpisah dan konsep evaluasinya dapat dilakukan dengan cara *me-ranking* maupun *me-rating*. Metode ini memiliki dua keterbatasan:

- a. Semakin banyak atribut dan level, maka akan semakin banyak stimulus yang akan dievaluasi oleh responden mempunyai kecenderungan untuk mempermudah keputusannya dengan hanya memperhatikan beberapa atribut saja, padahal mereka seharusnya mempertimbangkan setiap atribut.
- b. Urutan atribut-atribut yang berada pada stimuli dapat mempengaruhi evaluasi. Jadi, untuk meminimalisasi pengaruhnya perlu dirubah urutan atribut antar responden.

Stimuli yang dihasilkan mengikuti prinsip-prinsip desain eksperimen. Level dari atribut diberi peluang berpasangan dengan masing-masing atribut lainnya yang disebut *full factorial design* (Gudono, 2011). Banyaknya stimuli yang dihasilkan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Jumlah level sama dalam variabel

$$k \times k \times \dots \times k = k^N$$

Jumlah level berbeda pada tiap variabel

$$k \times k \times \dots \times k \times l \times l \dots \times l = k^N \times l^M$$

dengan:

k, l : banyak level yang sama pada atribut

N, M : banyak variabel yang jumlah levelnya sama

Berdasarkan Tabel 7 dan rumus tersebut, dapat dihitung banyaknya stimuli yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu:

$$3^2 \times 2^2 = 36 \text{ stimuli}$$

3. Penentuan jenis data

Data yang diperlukan dalam analisis konjoin dapat berupa nonmetrik (nominal dan ordinal) maupun metrik (berskala interval atau rasio). Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu data nonmetrik. Responden

diminta untuk memberikan penilaian (*rating*) terhadap masing-masing level atribut dengan menggunakan skala likert mulai dari 1 hingga 5 (1 = sangat tidak diinginkan, 5 = sangat diinginkan). Bila dibandingkan dengan nonmetrik, cara ini lebih disukai oleh responden karena tidak membutuhkan pertimbangan terlalu rumit.

4. Metode Analisis

Menurut Hair *et al.* (2010), analisis konjoin mempunyai paling sedikit asumsi tentang estimasi model. Desain yang optimal yaitu desain yang *orthogonal* (tidak ada korelasi antar level atribut) dan *balance* (setiap level muncul dalam jumlah yang sama). Secara umum model dasar analisis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$U(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{K_j} \beta_{ij} X_{ij}$$

Keterangan:

$U(x)$ = utilitas total

β_{ij} = nilai kegunaan atribut ke- i taraf ke- j

X_{ij} = peubah boneka atribut ke- i taraf ke- j

K_j = banyaknya taraf ke- j dari atribut ke- i

m = banyaknya atribut

Utilitas total atau nilai kegunaan total diperoleh dari penjumlahan koefisien nilai kegunaan tiap atribut dalam satu profil. Nilai kegunaan merupakan nilai preferensi yang diberikan responden terhadap setiap level atribut yang ada pada produk (Basuki, 2002).

Hasil dari penelitian konjoin adalah total kepuasan responden dari berbagai atribut yang terdapat dalam konsep. Tingkat kepentingan dari tiap atribut didefinisikan sebagai selisih antara nilai kegunaan maksimum dan nilai kegunaan minimum, atau diformulasikan sebagai berikut (Supranto, 2004):

$$I_j = \{\max(\alpha_{ij}) - \min(\alpha_{ij})\} \text{ untuk setiap } i$$

dengan:

I_j : tingkat kepentingan atribut ke- i

α_{ij} : nilai kegunaan atribut ke- i level ke- j

Nilai kepentingan relatif (NRP) suatu atribut terhadap atribut lainnya adalah sebagai berikut (Supranto, 2004):

$$W_i = \frac{I_i}{\sum_{i=1}^m I_i}$$

dengan:

W_i : tingkat kepentingan relatif (NRP)

I_i : tingkat kepentingan atribut ke- i

Alat analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama dalam penelitian ini adalah SPSS 24.

5. Interpretasi Hasil

Tahapan terakhir dari analisis konjoin adalah interpretasi hasil. Pada tahap ini didapatkan nilai *utility* yang merupakan nilai setiap taraf dari masing-masing faktor, atau sifat relatif terhadap taraf lainnya. Preferensi petani didapatkan dari nilai *utility*, sehingga akan diketahui kombinasi yang paling disukai dan dapat diketahui pula faktor yang paling mempengaruhi responden dalam memilih kombinasi-kombinasi. Ada beberapa ketentuan dalam *utility* yaitu:

- Taraf yang memiliki nilai *utility* lebih tinggi adalah taraf yang lebih disukai.
- Total *utility* masing-masing kombinasi sama dengan jumlah *utility* tiap taraf dari faktor-faktor tersebut.
- Kombinasi yang memiliki total *utility* tertinggi adalah kombinasi yang paling disukai responden.
- Faktor yang memiliki perbedaan *utility* lebih besar antara nilai *utility* taraf tertinggi dan terendahnya merupakan faktor yang lebih penting.
- Jika semua kemungkinan taraf suatu faktor memiliki nilai *utility* yang sama, berarti faktor tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap responden.

Menurut Santoso (2010), analisis konjoin pada prinsipnya bertujuan untuk memperkirakan pola pendapat responden yang disebut *Estimates Part-Worth* dan kemudian membandingkan dengan pendapat responden yang sebenarnya (*Actual*) yang ada pada proses stimuli. Seharusnya hasil konjoin tidak berbeda jauh dengan pendapat responden yang sebenarnya, yang dicerminkan dengan tingginya angka korelasi antara hasil *Estimates* dan hasil *Actual*. Inilah yang disebut dengan *Predictive Accuracy*, yakni mengukur Tingkat Ketepatan Prediksi yang dicerminkan dengan adanya korelasi yang tinggi dan signifikan antara hasil *Estimates* dan hasil *Actual*. Korelasi dapat

dikatakan tinggi apabila pengukuran korelasi baik secara Pearson ataupun Kendall menghasilkan angka korelasi yang relatif kuat, yakni di atas 0,5. Sedangkan korelasi dapat dikatakan signifikan apabila angka *Significance* keduanya di bawah 0,05.



V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

5.1.1. Wilayah Administratif

Desa Srimulyo merupakan salah satu desa agraris yang terdapat di Kecamatan Dampit yang secara administratif termasuk dalam Kabupaten Malang. Kabupaten Malang secara administratif termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, terletak pada $112^{\circ}17'10,90''$ sampai dengan $112^{\circ}57'00''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'55,11''$ sampai dengan $8^{\circ}26'35,45''$ Lintang Selatan. Jarak antara Desa Srimulyo dengan ibukota kabupaten terdekat sekitar 48 km dan sekitar 8 km dari kecamatan terdekat. Desa Srimulyo terbagi menjadi 5 dusun, yaitu Dusun Purwosari, Dusun Balerejo, Dusun Semberarum, Dusun Sukorejo, dan Dusun Darungan. Peta Desa Srimulyo ditunjukkan pada Lampiran 4. Batas administratif Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Baturetno

Batas Selatan : Desa Purwodadi

Batas Barat : Desa Sukodono

Batas Timur : Desa Sumber Tangkil dan Desa Kepatihan

5.1.2. Keadaan Geografis

Menurut data profil desa, Desa Srimulyo mempunyai luas wilayah $\pm 2.065,60$ Ha dengan ketinggian di atas permukaan laut sebesar 500 – 600 mdpl. Curah hujan desa ini rata-rata 1.419 mm/th dan memiliki suhu $21 - 24^{\circ}\text{C}$. Kondisi ini cocok bagi petani untuk menanam beberapa komoditas perkebunan seperti kopi, cengkeh, dan tebu.

Keseluruhan dari luas wilayah tersebut kemudian terbagi menjadi wilayah pemukiman, pertanian/perkebunan, sawah, dan lain-lain. Pembagian wilayah di Desa Srimulyo secara rinci dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Penggunaan Lahan di Desa Srimulyo

No.	Areal	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sawah	10	0,48
2	Perkebunan	1.960,4	94,9
3	Pemukiman	65	2,59
4	Lain-lain	50	2,42
Total		2.065,60	100

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui sebagian besar wilayahnya digunakan untuk perkebunan yaitu sebesar 1.960,4 Ha atau 94,9% dari total luas daerah. Sedangkan luas sawah sebesar 10 Ha atau 0,48% dari total luas daerah. Untuk luas tanah pemukiman sebesar 65 Ha atau 2,59% dari total luas daerah. Sedangkan luas tanah lain-lain sebesar 50 Ha atau 2,42% dari total luas daerah. Sehingga dapat disimpulkan jika penggunaan lahan di Desa Srimulyo mayoritas digunakan untuk lahan perkebunan. Hal itu dikarenakan oleh kondisi tanah di daerah tersebut memang cocok untuk digunakan sebagai lahan perkebunan. Tanaman yang banyak ditanam adalah tanaman kopi, pisang mas, salak, dan tebu. Maka dari itu sebagian besar penduduk di Desa Srimulyo bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan luas wilayah yang dijadikan untuk pemukiman warga hanya sekitar 65 Ha. Dengan kondisi seperti ini peluang warga Desa Srimulyo untuk mengembangkan usahatani komoditas perkebunan sangat besar karena ditunjang dengan potensi lahan yang masih sangat luas dibanding pemukimannya.

5.1.3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur

Sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan suatu wilayah. Suatu wilayah yang sebagian besar penduduknya adalah usia produktif (usia 15 – 55 tahun) akan lebih mudah berkembang daripada wilayah yang mempunyai penduduk dengan usia produktif lebih sedikit. Berdasarkan hasil penelitian akan dikemukakan komposisi penduduk di Desa Srimulyo berdasarkan umur pada tabel 9.

Tabel 9. Jumlah Penduduk Desa Srimulyo Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	0 – 12 bulan	201	1,65
2	1 tahun – 14 tahun	2.887	23,73
3	15 tahun – 55 tahun	8.295	68,19
4	> 55 tahun	782	6,43
Total		12.165	100

Sumber: Profil Desa Srimulyo, 2016 (diolah)

Berdasarkan data komposisi penduduk berdasarkan umur diketahui jika mayoritas penduduk Desa Srimulyo berada dalam kategori usia produktif yaitu sebanyak 8,295 orang atau 68,19% dari total penduduk di Desa Srimulyo. Hal ini menunjukkan jika tingkat ketersediaan tenaga kerja di Desa Srimulyo cukup tinggi

dan bisa menjadi peluang untuk meningkatkan produksi komoditas kopi yang diseimbangkan dengan potensi luas lahan yang ada.

5.1.4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keberhasilan pengembangan suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh jumlah (kuantitas) penduduk yang ada di wilayah tersebut tetapi juga tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Suatu wilayah yang mayoritas penduduknya berpendidikan rendah akan sulit menerima inovasi baru karena kurangnya pengetahuan dan kemauan mencoba hal-hal baru. Selain itu kuatnya pegangan pada adat istiadat juga menjadi salah satu penghambat masuknya inovasi baru. Berdasarkan hasil penelitian akan diuraikan komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel 10.

Tabel 10. Jumlah Penduduk Desa Srimulyo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tidak sekolah	3.151	25,90
2	Tamat SD / Sederajat	5.308	43,63
3	Tamat SMP / Sederajat	2.722	22,37
4	Tamat SMU / Sederajat	984	8,09
Total		12.165	100

Sumber: Profil Desa Srimulyo, 2016 (diolah)

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas dapat diketahui jika persentase penduduk yang tidak pernah mendapat pendidikan di sekolah mencapai 25,09% dan sebagian besar penduduk (43,63%) hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar (SD). Di dalam persentase tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Srimulyo masih tergolong rendah. Kondisi ini ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang masih minim. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Prasarana Pendidikan Formal di Desa Srimulyo

No.	Jenis Prasarana	Keterangan	
		Ada / Tidak Ada	Baik / Rusak
1	Taman Kanak-kanak	Ada	Baik
2	Sekolah Dasar	Ada	Baik
3	SMP / Sederajat	Ada	Baik
4	SMU / Sederajat	Tidak Ada	-
5	Universitas / Sekolah Tinggi	Tidak Ada	-

Sumber: Profil Desa Srimulyo, 2016 (diolah)

Berdasarkan data pada tabel di atas maka diketahui jika jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Desa Srimulyo masih sangat terbatas sehingga kurang mendukung peningkatan kualitas sumber daya masyarakat. Di Desa Srimulyo hanya terdapat 1 sekolah untuk tingkat SMP sehingga jika ingin meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi maka harus menempuh jarak yang lumayan jauh karena fasilitas sekolah SMU/ sederajat berada di luar Desa Srimulyo. Kondisi ini menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Srimulyo tidak mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, sehingga tidak mempunyai daya saing yang kuat dan susah menerima teknologi terutama untuk kemajuan pertanian kopi robusta. Selain itu hal ini menyebabkan mudah dipermainkan oleh *stakeholder* pertanian kopi robusta di luar Desa Srimulyo khususnya terkait dengan harga kopi robusta. Oleh karena itu diharapkan peran serta warga dan aparat desa serta pemerintah untuk dapat bekerjasama menyediakan sarana belajar yang memadai guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Srimulyo.

5.1.5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

Berdasarkan hasil penelitian akan diuraikan komposisi mata pencapaian penduduk di Desa Srimulyo pada tabel 12.

Tabel 12. Mata Pencapaian Penduduk Desa Srimulyo

No.	Mata Pencapaian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Petani	2.735	64,59
2	Peternak	1.409	33,27
3	Pegawai Negeri Sipil	43	1,01
4	Buruh Bangunan / Tukang	41	0,97
5	TNI	6	0,14
Total		4.234	100

Sumber: Profil Desa Srimulyo, 2016 (diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Srimulyo berprofesi sebagai petani. Selain itu ada yang berprofesi sebagai peternak, pegawai negeri sipil, buruh bangunan atau tukang, dan TNI. Mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani disebabkan potensi wilayah Desa Srimulyo yang sangat baik untuk pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam kehidupan perekonomian sehingga pemerintah harus lebih memperhatikan arah kebijakan pertanian yang diberlakukan.

5.2. Karakteristik Petani Responden

Karakteristik petani responden dijelaskan untuk memberikan gambaran bagaimana analisis preferensi petani kopi robusta terhadap kebijakan pertanian di Desa Srimulyo penting untuk dilakukan. Setiap responden petani memiliki karakteristik yang berbeda yang berpengaruh terhadap keputusan petani dalam menentukan dan menjalankan kegiatan usahatani kopinya. Dalam penelitian ini, karakteristik petani responden yang diuraikan meliputi umur dan pengalaman berusahatani.

5.2.1. Umur Petani Responden

Mudah atau tidaknya petani responden dalam menerima atau mengadopsi inovasi, serta dalam melakukan usahatani kopi berkaitan dengan umur petani. Selain itu, umur petani mempengaruhi kemampuan fisik dalam berusahatani sehingga petani yang lebih muda cenderung lebih dinamis dan produktif. Distribusi responden berdasarkan umur disajikan secara rinci pada tabel 13.

Tabel 13. Distribusi Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	28 – 46	26	55,31
2	47 – 65	20	42,55
3	66 – 84	1	2,12
Total		47	100

Sumber: Data Primer, 2017 (diolah)

Jumlah petani responden terbesar berada pada interval umur 28 – 46 tahun yang berjumlah 26 orang dengan persentase 55,31%. Sebaliknya, jumlah petani responden terendah berada pada interval umur 66 – 84 tahun yang berjumlah 1 orang dengan persentase 2,12%. Jadi, sebagian besar petani responden merupakan petani dengan umur yang masih produktif sehingga secara fisik berpotensi untuk dikembangkan.

5.2.2. Pengalaman Berusahatani Petani Responden

Pengalaman petani responden dalam berusahatani mempengaruhi petani dalam mengelola kegiatan usahatannya. Semakin lama pengalaman yang dimiliki, maka semakin baik keputusan petani dalam mengelola kegiatan usahatani kopinya karena semakin banyak pengetahuan yang dimiliki petani. Pengetahuan tersebut dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh petani dalam

memilih kebijakan yang sesuai dengan preferensi dan tingkat kepentingan relatifnya. Adapun distribusi petani responden berdasarkan pengalaman berusahatani ditunjukkan pada tabel 14.

Tabel 14. Distribusi Responden Berdasarkan Pengalaman Berusahatani

No.	Pengalaman (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	6 – 26	29	61,70
2	27 – 47	16	34,04
3	48 – 68	2	4,25
Total		47	100

Sumber: Data Primer, 2017 (diolah)

Berdasarkan tabel 14, dapat diketahui bahwa petani responden dengan pengalaman berusahatani 6 – 26 tahun merupakan petani yang paling mendominasi dibandingkan dengan interval pengalaman berusahatani lainnya, yaitu 29 orang dengan persentase 61,70%. Dapat dilihat bahwa petani responden memiliki pengalaman yang cukup baik dalam berusahatani.

5.3. Analisis Preferensi Petani Kopi Terhadap Kebijakan Pertanian

Setelah dilakukan proses konjoin dengan memasukkan data yang berisi pendapat setiap responden terhadap 36 stimuli (secara rinci ditunjukkan pada Lampiran 5), didapatkan nilai *utility* secara umum untuk setiap taraf. *Utility* merupakan tingkat kepuasan responden terhadap berbagai taraf atribut. Taraf yang memiliki nilai *utility* lebih besar adalah taraf yang lebih disukai oleh responden. Hasil analisis tersebut ditunjukkan pada tabel 15.

Tabel 15. Hasil Utilities untuk Overall Statistics

Atribut	Taraf	Utility Estimate	Std. Error
Teknis	Irigasi	-33,384	1,667
	Alsintan	29,454	1,667
	P.Organik	3,930	1,667
Ekonomi	Pupuk	28,499	1,667
	Benih	-23,061	1,667
	P. Panen	-5,437	1,667
Kelembagaan	Lembaga	13,570	1,179
	Koperasi	-13,570	1,179
Lingkungan	Konservasi	-9,257	1,179
	Biodiversitas	9,257	1,179
(Constant)		128,335	1,179

Sumber: Data Primer, 2018 (diolah)

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan aspek teknis produksi, secara umum responden suka dengan kebijakan bantuan alsintan karena *utility* untuk bantuan alsintan mempunyai nilai yang lebih besar, yaitu sebesar 29,454. Sedangkan *utility* untuk pembuatan pupuk organik dan pembangunan irigasi mempunyai nilai yang lebih kecil, yaitu sebesar 3,930 dan -33,384. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa mesin pengolahan pasca panen yang dimiliki oleh petani kopi robusta di Desa Srimulyo masih terbilang sedikit dan kurang dapat mencukupi kebutuhan petani. Mesin tersebut diantaranya yaitu mesin pengupas kulit kopi basah (mesin *pulper*) dan mesin pengupas kulit ari kopi kering (mesin *huller*).

Saat ini, sebagian besar petani kopi robusta di Desa Srimulyo masih mengandalkan jasa pelayanan alsintan untuk menyewa mesin-mesin tersebut. Menurut Tambunan dan Sembiring (2007), penerapan sistem jasa pelayanan alsintan juga mempunyai kelemahan karena keterbatasan untuk memberi layanan yang tepat waktu dan menguntungkan kepada petani. Dengan semakin bertambahnya ketersediaan mesin-mesin tersebut, kegiatan pengolahan pasca panen kopi akan menjadi lebih efisien. Menurut Tambunan dan Sembiring (2007), kehadiran alat dan mesin pertanian di pedesaan diharapkan dapat mengisi kekurangan tenaga kerja manusia yang semakin mahal, dapat meningkatkan efisiensi usaha tani dengan penghematan tenaga, waktu dan biaya produksi, dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dan komparatif komoditas pertanian, serta untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Di sisi lain, pembuatan pupuk organik dan pembangunan irigasi bukanlah menjadi hal yang secara umum diinginkan oleh petani kopi robusta di Desa Srimulyo. Meskipun dapat mengurangi biaya produksi dan menambah pendapatan petani, pembuatan pupuk organik yang kurang praktis dan menghasilkan aroma tidak sedap menjadi pertimbangan bagi petani dalam memilih kebijakan tersebut. Menurut Glio (2015), dalam pembuatan pupuk kandang dan kompos, kendala yang sering terjadi adalah masalah pengangkutan dan distribusi. Sedangkan untuk pembangunan irigasi, secara umum para petani menganggap bahwa kebutuhan air untuk tanaman kopi sudah dapat tercukupi pada saat musim hujan sehingga pembangunan irigasi tidak perlu dilakukan. Selain itu, musim kering yang agak

panjang pun sangat diperlukan untuk memperoleh produksi yang tinggi. Menurut AAK (1988), adanya musim kering dengan temperatur yang tinggi sangat diperlukan untuk persiapan pembungaan dan pembentukan buah, tetapi pada mekarnya bunga menghendaki curah hujan secukupnya.

Berdasarkan aspek ekonomi produksi, secara umum responden suka dengan kebijakan harga pupuk karena *utility* untuk harga pupuk adalah positif, yaitu sebesar 28,499. Sedangkan *utility* untuk harga benih dan penanganan pasca panen adalah negatif, yaitu sebesar -23,061 dan -5,437. Hal tersebut dapat terjadi karena pupuk merupakan sarana produksi yang digunakan petani secara berkala sehingga dibutuhkan kebijakan yang dapat meringankan biaya pembelian pupuk. Menurut Syafa'at *et al.* (2006), kebijakan subsidi pupuk dinilai berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian dan pendapatan petani. Selama ini, subsidi pupuk yang tersedia bagi petani kopi robusta di Desa Srimulyo masih terbilang sedikit dan tidak terdistribusi secara merata. Permasalahan tersebut sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyadi dan Tobirin (2013) yang menunjukkan bahwa petani di Desa Pamulihan Kecamatan Larangan merasa kesulitan dalam mendapatkan subsidi pupuk karena pendistribusian yang kurang tepat sasaran. Petani menilai bahwa penyaluran pupuk oleh pemerintah kepada petani melalui distributor merupakan penyebab kelangkaan dan tingginya harga pupuk. Petani menginginkan perubahan pola distribusi pupuk oleh pemerintah, yang tadinya melalui distributor dialihkan kepada kelompok tani untuk dapat langsung disalurkan kepada petani.

Kebijakan harga benih dan penanganan pasca panen bukanlah menjadi hal yang secara umum diinginkan oleh petani kopi robusta di Desa Srimulyo. Kopi merupakan tanaman tahunan sehingga benih kopi bukanlah sarana produksi yang dibutuhkan petani secara berkala dalam waktu yang singkat. Selain itu, pengalaman petani yang pernah mendapatkan bantuan benih kopi dengan mutu yang kurang baik menjadi pertimbangan bagi petani dalam memilih kebijakan tersebut. Sedangkan untuk penanganan pasca panen, secara umum para petani sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai cara penanganan pasca panen kopi dari hasil pelatihan dan penyuluhan yang telah diberikan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Dengan dilakukannya penanganan pasca panen yang sesuai, biji kopi yang

dihasilkan menjadi berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi. Namun untuk jangka panjang, kebijakan tersebut akan kurang bermanfaat jika diterapkan secara berulang kali dalam proses pelaksanaannya sehingga penanganan pasca panen bukanlah menjadi hal yang secara umum diinginkan oleh petani kopi robusta di Desa Srimulyo.

Berdasarkan aspek kelembagaan pertanian, secara umum responden suka dengan kebijakan penguatan kelembagaan karena *utility* untuk penguatan kelembagaan adalah positif, yaitu sebesar 13,570. Sedangkan *utility* untuk pengembangan koperasi tani adalah negatif, yaitu sebesar -13,570. Hal tersebut dapat terjadi karena penguatan kelembagaan diperlukan sebagai upaya dalam memajukan kesejahteraan para petani melalui keikutsertaannya di dalam kelompok tani. Petani menginginkan adanya upaya dalam memperkuat kelembagaan kelompok tani, salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pemberdayaan yang dapat menciptakan kemandirian bagi diri mereka. Menurut Zakaria (2009), pemberdayaan berarti memanfaatkan secara optimal berbagai kemampuan, nilai atau norma serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat termasuk juga menumbuhkembangkan daya usaha kelompok masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan melakukannya sendiri. Pengembangan sumber daya manusia ditempuh melalui: pelatihan manajemen organisasi dan usaha ekonomi produktif, kursus dan magang.

Pengembangan kelembagaan bagi masyarakat petani dianggap penting karena beberapa alasan. Pertama, banyak masalah pertanian yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga petani. Kedua, organisasi masyarakat memberikan kelanggengan atau kontinuitas pada usaha-usaha untuk menyebarkan dan mengembangkan teknologi, atau pengetahuan teknis kepada masyarakat. Ketiga, untuk menyiapkan masyarakat agar mampu bersaing dalam struktur ekonomi yang terbuka (Bunch, 1991). Selama ini pengembangan kelembagaan petani kopi robusta di Desa Srimulyo masih terbatas pada program penyuluhan dalam bidang teknis produksi dan kurang memperhatikan bidang organisasi, manajerial, keuangan, dan administrasi. Dampak yang ditimbulkan salah satunya yaitu masih banyak petani yang kesulitan dalam membuat pembukuan usaha tani dalam menjalankan

usahanya. Padahal pembukuan usaha dapat membantu petani dalam membuat keputusan dan mengatur keuangannya agar sesuai dengan sasaran dan tujuan usaha.

Di samping itu, kebijakan pengembangan koperasi tani bukanlah menjadi hal yang secara umum diinginkan oleh petani kopi robusta di Desa Srimulyo. Hal tersebut dapat terjadi karena meskipun pada dasarnya koperasi tani memiliki peran penting dalam memajukan hasil usaha tani, secara umum mereka sudah terbiasa melakukan usaha tani tanpa mengandalkan adanya bantuan koperasi. Selain itu, keberadaan koperasi tani yang masih baru berdiri tersebut belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari para petani. Sampai saat ini pemerintah sudah memberikan dana sebagai bentuk upaya pengembangan koperasi tani bagi petani kopi robusta di Desa Srimulyo. Namun dana tersebut masih belum dikelola secara optimal karena masih terbatasnya pengetahuan para petani terhadap peran dan fungsi dari koperasi.

Menurut Syarif dan Zainuddin (2017), banyak kendala dan hambatan yang harus diperhatikan dalam pengembangan koperasi di pedesaan, diantaranya adalah: (a) Rendahnya minat masyarakat untuk bergabung dalam kelompok tani / koperasi, hal ini disebabkan karena kegagalan-kegagalan dan stigma negatif tentang kelembagaan tani / koperasi yang terbentuk di dalam masyarakat. Kegagalan yang dimaksud diantaranya adalah ketidakmampuan kelembagaan tani / koperasi dalam memberikan kebutuhan anggotanya dan ketidakmampuan dalam memasarkan hasil produk pertanian anggotanya. (b) Adanya ketergantungan petani kepada tengkulak akibat ikatan yang ditimbulkan karena petani melakukan transaksi dengan para tengkulak (pinjaman modal, dan memasarkan hasil). (c) Rendahnya SDM petani di pedesaan menimbulkan pemahaman dan arti penting koperasi terabaikan.

Berdasarkan aspek kelestarian lingkungan, secara umum responden suka dengan kebijakan biodiversitas atau penyelamatan keanekaragaman karena *utility* untuk biodiversitas adalah positif, yaitu sebesar 9,257. Sedangkan *utility* untuk konservasi lahan adalah negatif, yaitu sebesar -9,257. Hal tersebut dapat terjadi karena para petani sudah memiliki pemahaman bahwa keanekaragaman hayati dapat memberikan manfaat bagi usaha yang mereka lakukan baik dalam bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Biodiversitas erat kaitannya dengan diversifikasi. Dengan adanya perluasan dari suatu jenis usaha yang diusahakan

selama ini ke jenis usaha baru yang sebelumnya tidak diusahakan, para petani memiliki peluang dalam meminimumkan risiko usaha, yaitu terjadinya penurunan tingkat pendapatan. Penurunan tersebut dapat terjadi jika usaha tani yang diusahakan petani selama ini, yaitu kopi robusta, mengalami penurunan hasil produksi atau gagal panen.

Petani kopi robusta di Desa Srimulyo secara umum menginginkan adanya perluasan jenis usaha baru yang memiliki prospek yang bagus dan cocok untuk dikembangkan di wilayah tersebut. Selama ini sudah terdapat beberapa jenis tanaman yang dikembangkan di Desa Srimulyo selain kopi robusta, diantaranya yaitu pisang, tebu, cengkeh, dan salak. Beberapa jenis tanaman tersebut berpotensi dalam menghasilkan produksi yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani selain dari hasil penjualan kopi robusta. Adapun beberapa tujuan dalam melakukan diversifikasi menurut Pakpahan (1989) antara lain adalah (1) meminimumkan risiko, (2) menghindari akibat buruk dari fluktuasi ekonomi, dan (3) sebagai sumber pertumbuhan baru.

Kebijakan konservasi lahan bukanlah menjadi hal yang secara umum diinginkan oleh petani kopi robusta di Desa Srimulyo. Pada dasarnya para petani sudah melakukan upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan lahan dengan cara mengurangi pemakaian pupuk kimia, menggunakan pupuk organik, tidak menggunakan pestisida, dan menjadikan tanaman pisang sebagai tanaman sela. Mereka juga berpendapat bahwa sumber daya alam yang tersedia masih terpelihara dengan baik dan terhindar dari bencana alam seperti banjir dan longsor. Selain itu berdasarkan penelitian, vegetasi tanaman kopi sendiri memiliki sifat-sifat botani yang sudah berperan sebagai sarana konservasi tanah. Hasil penelitian Hartobudoyo (1979) memperlihatkan bahwa 90 % perakaran tanaman kopi terkonsentrasi di lapisan tanah antara 0-30 cm. Dengan demikian terbentuk tenunan akar serabut yang baik di lapisan permukaan tanah dan hal ini menyebabkan tanah permukaan terikat oleh jaringan perakaran sehingga erosi tetap kecil walaupun aliran permukaan besar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampai batas tertentu, tanaman kopi memberikan efek konservasi tanah.

5.4. Analisis Tingkat Kepentingan Relatif Petani Kopi Terhadap Aspek Kebijakan Pertanian

Tingkat kepentingan relatif suatu atribut dibandingkan dengan atribut lainnya dapat diketahui dengan melihat nilai *Importance Values* yang besarnya dipengaruhi oleh nilai *utility* maksimum dan minimum dari taraf setiap atribut. *Importance Values* merupakan tingkat kepentingan relatif untuk setiap atribut. Nilai terbesar pada nilai *Importance Values* menunjukkan atribut yang paling mempengaruhi petani dalam memilih kebijakan pertanian. Hasil analisis tersebut ditunjukkan pada tabel 16.

Tabel 16. Hasil Importance Values untuk Overall Statistics

Atribut	Importance Values (%)
Teknis	38,949
Ekonomi	31,984
Kelembagaan	11,374
Lingkungan	17,693

Sumber: Data Primer, 2018 (diolah)

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa secara umum, responden menganggap aspek teknis produksi adalah faktor terpenting dalam menilai sebuah kebijakan pertanian karena memiliki nilai *Importance Values* yang paling besar, yaitu sebesar 38,949%. Di sisi lain, aspek kelembagaan pertanian paling dianggap tidak penting karena memiliki nilai yang paling kecil, yaitu sebesar 11,374%. Hasil analisis tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian ini yang menyatakan bahwa aspek teknis produksi merupakan faktor terpenting dalam menilai sebuah kebijakan pertanian. Hal tersebut dapat terjadi karena selisih antara nilai *utility* maksimum dan minimum untuk taraf atribut aspek teknis produksi, yaitu bantuan alsintan dan pembangunan irigasi, menghasilkan nilai yang paling besar diantara taraf atribut lainnya. Selain itu, pada kenyataannya biaya produksi lebih banyak dialokasikan ke aspek teknis daripada aspek lainnya, seperti biaya tenaga kerja dalam melakukan usaha tani.

Selanjutnya nilai korelasi digunakan untuk mengetahui apakah hasil konjoin secara agregat valid dalam memprediksi preferensi semua responden. Semakin tinggi korelasinya semakin cocok atau semakin baik modelnya. Untuk data ranking dilihat korelasi antara ranking aktual dan prediksi dengan Kendall's tau, sedangkan

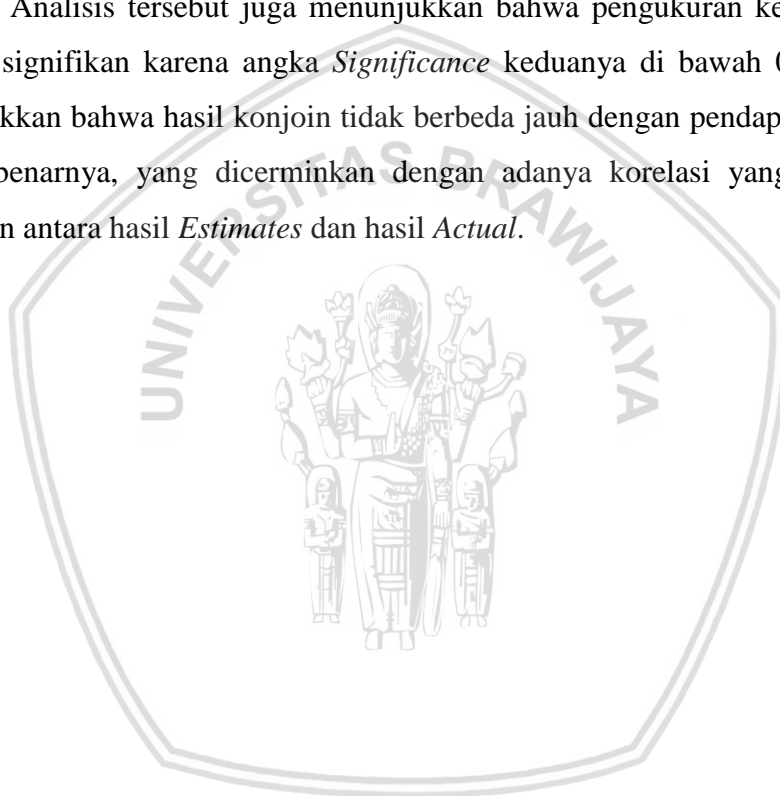
data rating digunakan korelasi Pearson's R. Hasil analisis tersebut ditunjukkan pada tabel 17.

Tabel 17. Hasil Correlations untuk Overall Statistics

	Value	Sig.
Pearson's R	0,986	0,000
Kendall's tau	0,965	0,000

Sumber: Data Primer, 2018 (diolah)

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pengukuran korelasi baik secara Pearson ataupun Kendall menghasilkan angka korelasi yang relatif kuat, yakni di atas 0,5. Analisis tersebut juga menunjukkan bahwa pengukuran kedua korelasi tersebut signifikan karena angka *Significance* keduanya di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hasil konjoin tidak berbeda jauh dengan pendapat responden yang sebenarnya, yang dicerminkan dengan adanya korelasi yang tinggi dan signifikan antara hasil *Estimates* dan hasil *Actual*.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Berdasarkan aspek teknis produksi, secara umum responden suka dengan kebijakan bantuan alsintan karena *utility* untuk bantuan alsintan mempunyai nilai lebih besar, yaitu sebesar 29,454. Berdasarkan aspek ekonomi produksi, secara umum responden suka dengan kebijakan harga pupuk karena *utility* untuk harga pupuk adalah positif, yaitu sebesar 28,499. Berdasarkan aspek kelembagaan pertanian, secara umum responden suka dengan kebijakan penguatan kelembagaan karena *utility* untuk penguatan kelembagaan adalah positif, yaitu sebesar 13,570. Sedangkan berdasarkan aspek kelestarian lingkungan, secara umum responden suka dengan kebijakan biodiversitas atau penyelamatan keanekaragaman karena *utility* untuk biodiversitas adalah positif, yaitu sebesar 9,257.
2. Secara umum, responden menganggap aspek teknis produksi adalah faktor terpenting dalam menilai sebuah kebijakan pertanian (38,949%). Di sisi lain, aspek kelembagaan pertanian paling dianggap tidak penting (11,374%). Pengukuran korelasi baik secara Pearson ataupun Kendall menghasilkan angka korelasi yang relatif kuat, yakni di atas 0,5. Analisis tersebut juga menunjukkan bahwa pengukuran kedua korelasi tersebut signifikan karena angka *Significance* keduanya di bawah 0,05.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan yang meliputi bantuan alsintan, harga pupuk, penguatan kelembagaan, dan penyelamatan keanekaragaman merupakan kombinasi kebijakan pertanian yang secara umum diinginkan petani kopi robusta di Desa Srimulyo. Keputusan para petani dalam memilih kombinasi kebijakan yang diinginkan berperan besar dalam menentukan kesuksesan usaha tani yang mereka lakukan di masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat

menyesuaikan antara kebijakan yang dirumuskan dengan keinginan para petani agar kesejahteraan mereka dapat meningkat dan tujuan pembangunan pertanian dapat terwujud. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya yaitu menambah bantuan berupa mesin *pulper* dan *huller*, pemerataan subsidi pupuk, mengadakan program pendampingan manajemen keuangan, dan membantu petani dalam mengembangkan usahanya melalui diversifikasi pertanian.

2. Aspek teknis produksi merupakan faktor terpenting dalam menilai sebuah kebijakan pertanian. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih kepada aspek tersebut agar tujuan terbentuknya kebijakan pertanian dapat tercapai secara optimal.



DAFTAR PUSTAKA

- AAK. 1988. *Budidaya Tanaman Kopi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Malang dalam Angka*. Malang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang.
- Basuki, A. 2002. *Penggunaan Analisis Conjoint Untuk Menentukan Preferensi Wisatawan Nusantara Pada Obyek Wisata Pantai Di Kabupaten Malang*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Bunch, Roland. 1991. *Dua Tongkol Jagung: Pedoman Pengembangan Pertanian Berpangkal Pada Rakyat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Chaplin. 2002. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindra Persada.
- Christina P. Parel, et al. 1973. *Sampling Design and Procedures*. New York: ADC.
- Churchill, G. A. 2005. *Dasar-dasar Riset Pemasaran Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Elsa, Yunita. 2017. *Hubungan Partisipasi Anggota dengan Kinerja Kelompok Tani*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Gaeki. 2013. Diakses 8 Desember 2017. <http://gaeki.or.id/areal-dan-produksi/>.
- Glio, M. Tosin. 2015. *Pupuk Organik & Pestisida Nabati No. 1 ala Tosin Glio*. Jakarta: AgroMedia Pustaka.
- Gudono. 2011. *Analisis Data Multivariat*. Yogyakarta: BPFE.
- Hair et al. 2010. *Multivariate Data Analysis, Seventh Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Hartobudoyo, D. 1979. *Pemangkasan kopi*. Jember: Balai Penelitian Perkebunan Bogor, Sub Balai Penelitian Budidaya.
- Hanafie, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: ANDI.
- International Coffee Organization. 2015. Diakses 5 Desember 2017. <http://www.ico.org/>.
- Mayrowani, Henny. 2013. *Kebijakan Penyediaan Teknologi Pascapanen Kopi dan Masalah Pengembangannya*. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Mittenzwei et al. 2015. *Hot cognition in agricultural policy preferences in Norway*. New York: Springer Science & Business Media.
- Mosher. 1987. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta: Yaguna.
- Noor, J. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.

- Nurafifah. 2016. *Analisis Kinerja Rantai Pasok Kopi Robusta Pada Kelompok Tani Sumbertani Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang*. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
- Orazem *et al.* 1988. *An Analysis of Farmers' Agricultural Policy Preferences*. Ames: Iowa State University.
- Pakpahan, A. 1989. *Refleksi Diversifikasi Dalam Teori Ekonomi*. Jakarta: Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI).
- Parel *et al.* 1973. *Sampling Design and Procedures*. PSSC. Philippine.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekjen Kementerian Pertanian. 2016. *Outlook Kopi*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Rahardjo, Pudji. 2012. *Panduan Budidaya dan Pengolahan Kopi Arabika dan Robusta*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Ramdhani, *et al.* 2015. *Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan Penguatan Kelompok Tani*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Riyadi dan Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rosyadi, Slamet dan Tobirin. 2013 *Perumusan Kebijakan Publik dalam Menggali Akar Kemiskinan*. Purwokerto: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman.
- Sajogyo, Pudjiwati. 2002. *Sosiologi Pedesaan, Kumpulan Bacaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Santoso, S. 2010. *Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Saptana *et al.* 2013. *Evaluasi Kebijakan Tujuh Gema Revitalisasi dalam Pembangunan Pertanian*. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Siagian dan Sugiarto. 2006. *Metode Statistika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Simatupang, Pantjar. 2003. *Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan*. Diakses 8 Desember 2017. <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/5487/4670>.
- Syafa'at *et al.* 2006. *Analisis Besaran Subsidi Pupuk dan Pola Distribusinya*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Syarif, Asriyanti dan Mutmainnah Zainuddin. 2017. *Inti Sari Sosiologi Pertanian*. Makassar: Inti Mediatama.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardoyo *et al.* 2016. *Dampak Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kinerja Ekonomi Kopi di Indonesia*. Malang: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
- Supranto, J. 2010. *Statistika*. Jakarta: Erlangga.
- Syahyuti. 2006. *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Syani, Abdul. 2005. *Masyarakat, Dinamika Kelompok dan Implikasi Kebudayaan dalam Pembangunan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Tambunan, Armansyah H. dan Sembiring. 2007. *Kajian Kebijakan Alat dan Mesin Pertanian*. Bogor: Departemen Teknik Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Variyam & Jordan. 1991. *Economic Perceptions and Agricultural Policy Preferences*. Milwaukee: Western Agricultural Economics Association.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winston, W. L. 2003. *Operation Research, Application and Algorithms, 4th edition*. Brooks/Cole.
- Wirawan, I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zakaria, Wan Abbas. 2009. *Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kunci Kesejahteraan Petani*. Bandar Lampung: Fakultas Pertanian Universitas Lampung.